

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL PENDAMPING PKH  
DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL  
DI DESA TELAGA SUKA**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**AZIRA WAHYU ARMANDA**

**1803100067**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
Konsentrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : **AZIRA WAHYU ARMANDA**  
NPM : 1803100067  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL PENDAPING  
PKH DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI DESA  
TELAGA SUKA

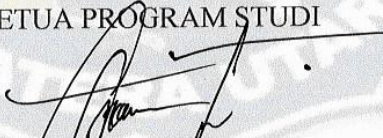
Medan, Oktober 2022

PEMBIMBING



**SYAFRUDDIN, S.Sos, MH**

DISETUJUI OLEH  
KETUA PROGRAM STUDI



**ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP**

DEKAN



**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : **AZIRA WAHYU ARMANDA**  
NPM : 1803100067  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari, Tanggal : Jumat, 07 Oktober 2022  
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.**(.....)

PENGUJI II : **H. MUJAHIDDIN, S.Sos, MSP** (.....)

PENGUJI III : **SYAFRUDDIN, S.Sos, MH** (.....)

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP**      **Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos, M.I.Kom**



## PERNYATAAN



Dengan ini saya, Azira Wahyu Armanda, NPM. 1803100067, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Oktober 2022  
Yang Menyatakan



AZIRA WAHYU ARMANDA  
NPM. 1803100067

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL PENDAMPING PKH  
DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL  
DI DESA TELAGA SUKA**

**Azira Wahyu Armanda  
1803100067**

**ABSTRAK**

Program Keluarga Harapan merupakan bantuan tunai bersyarat yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Keberhasilan PKH salah satunya ditentukan oleh pendamping program yang intensif dan berkelanjutan yang memiliki peran sebagai Fasilitator, Mediator dan Advokasi. Perbandingan rasio pendamping PKH dengan peserta PKH yang tidak seimbang di desa Desa Telaga Suka menjadi beban tersendiri bagi pendamping mengingat jumlah penerima manfaat tidak sedikit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pendamping dalam pelaksanaan program keluarga harapan dalam penyaluran bantuan sosial di desa Telaga Suka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan ditentukan dengan teknik *Purposive Sampling*. Data yang digunakan terdiri data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi dengan memanfaatkan sumber data yang terkumpul. Data dianalisis menggunakan model interaktif berdasarkan aspek-aspek yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping dalam pelaksanaan PKH di desa Telaga Suka sudah efektif. Pemahaman program, pendamping PKH telah mampu memahami dengan jelas mengenai tugas dan fungsi yang harus dijalankan, Ketepatan waktu sudah cukup baik dari waktu pelaksanaan program hingga berakhirnya program sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. dan pencapaian tujuan penyaluran dana bantuan sejauh ini sudah berjalan dengan sangat baik, pencapaian tujuan yang dilaksanakan pendamping PKH telah memenuhi sasaran, terlihat dari keberhasilan pendamping PKH dalam memberdayakan masyarakat miskin. Namun ada beberapa peran yang belum maksimal dilakukan oleh pendamping PKH seperti pencapaian tujuan dan juga keakuratan hasil kerja.

***Kata Kunci : Efektivitas, Pengawasan Internal, Program Keluarga Harapan (PKH)***

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul "**Efektivitas Pengawasan Internal Pendamping PKH dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Desa Telaga Suka**". Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan kerendahan hati dan rasa ikhlas penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi sempurnanya penulisan skripsi ini. Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari penulis kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam pengerjaan skripsi
2. Ayahanda Zulkifli dan Ibunda Leni Gusnimar tercinta serta seluruh Keluarga Besar saya yang telah banyak berkorban dan membesarkan, mendidik serta memberikan dukungan baik moral dan material, sehingga penulis dapat memperoleh keberhasilan.
3. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Arifin Saleh S.Sos, MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos,M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, MSP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Syafruddin S.Sos,.M.H selaku pembimbing saya yang telah meluangkan waktunya,memberikan arahan,semangat dan nasehat dalam penulisan skripsi saya
9. Bapak/Ibu Staf pegawai di kantor kepala desa khususnya kepada Bapak Kepala desa Telaga Suka yang telah memberi izin penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.
10. Terima kasih juga untuk Teman Saya Rohman dan Rizky yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian Skripsi ini.
11. Terima kasih juga buat Teman-Teman seperjuang IAP 2018 yang sudah bersama-sama melewati proses belajar dengan penulis.

Medan, 26 September 2022

Penulis

**Azira Wahru Armanda**  
**NPM : 1803100067**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>8</b>
2.1 Konsep Efektivitas .....	8
2.2 Konsep Pengawasan.....	12
2.3 Pendamping Sosial .....	20
2.4 Program Keluarga Harapan (PKH) .....	23
<b>BAB METODE PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Kerangka Konsep .....	28
3.3 Definisi Konsep.....	29



3.4 Kategorisasi .....	30
3.5 Informan Penelitian .....	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.7 Teknik Analisis Data.....	33
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
3.9 Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian.....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	40
4.1.1 Karakteristik Responden .....	40
4.1.2 Deskripsi Data .....	42
4.2 Pembahasan.....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
5.1 Simpulan .....	72
5.2 Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>80</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Kategorisasi.....	30
Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin.....	41
Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Menurut Umur .....	41
Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan .....	42
Tabel 4.4 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH .....	66

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep .....	29
----------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- I. : Daftar Riwayat Hidup Lampiran
- II. : Daftar Pedoman Wawancara Lampiran
- III. : Surat Izin Penelitian Lampiran
- IV. : Balasan Surat Izin Penelitian Lampiran
- V. : SK – 1 Permohonan Judul Skripsi Lampiran
- VI. : SK – 2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Lampiran
- VII. : SK – 3 Permohonan Seminar Proposal Lampiran
- VIII. : SK – 4 Undangan Seminar Proposal Lampiran
- IX. : SK – 5 Berita Acara Bimbingan Skripsi

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemberdayaan masyarakat dapat dipahami sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh kekuatan, dan atau proses memberi daya dari pihak yang memiliki kemampuan kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pemberdayaan juga mengandung dua makna. Pertama *to give power or authority* dimaknai sebagai pemberian kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Kedua *to give ability to or enable* dimaknai memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain yang berhak untuk melakukan sesuatu (Brantas, 2009).

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. (Dany & Habibah, 2021)

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, KM

didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional ([kemensos.go.id](http://kemensos.go.id). Diakses Pada 10 Juni 2022).

Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS, 2016). Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (*gini ratio*) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga, seperti di beberapa negara pelaksana CCT lainnya. PKH berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima manfaat di Indonesia sebesar 4,8%.

Menurut Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018, bantuan sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga atau seseorang miskin, tidak mampu, atau rentan terhadap risiko sosial. Penyalurannya berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH. PKH yang digagas sejak tahun 2007 syarat



kepesertaannya adalah keluarga tersebut memiliki ibu hamil, balita, anak usia sekolah SD sampai SMA atau sederajat, penyandang disabilitas berat, dan lanjut usia 70 tahun ke atas.

Program pemberian uang tunai kepada RTSM berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya, PKH difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat miskin melalui pemberdayaan kaum ibu, dan mendorong agar anaknya tetap bersekolah sesuai dengan data yang ditetapkan oleh BPS sebagai target peserta. PKH dilatar belakangi karena masih banyaknya RTSM yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan disebabkan oleh akar permasalahan yang terjadi baik pada sisi RTSM (demand) maupun sisi pelayanan (*supply*). (Haeruddin, 2021)

Dalam pelaksanaan PKH, terdapat pendamping yang merupakan aktor penting dalam menyukseskan PKH. Pendamping PKH adalah sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrakkerjakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat Kecamatan. keberhasilan PKH dipengaruhi oleh implementasi pemberdayaan masyarakat miskin (RTSM) dan peran pendamping. Pendamping merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak-pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun dengan program di tingkat kabupaten/kota. Tugas dan tanggungjawab pendamping PKH secara umum adalah melaksanakan tugas pendampingan kepada RTSM/KSM peserta PKH. Selain tugas tersebut, pendamping juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat miskin yang menjadi sasaran program.

Pendamping memiliki tugas kepada RTSM penerima PKH, melakukan pendampingan dan memberikan informasi kepada setiap kota atau kecamatan memberikan pemahaman pengertian dan tujuan PKH, prosedur dan mekanisme PKH, hak dan kewajiban penerima PKH, syarat penerima PKH, dan manfaat PKH diwilayah tempat ia bertugas. Peranan pendamping PKH dalam pelaksanaan program dilapangan secara langsung maupun tidak langsung sangat menentukan berhasil tidaknya kegiatan program dilapangan. lokasi penelitian yang diambil adalah Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu. Alasan peneliti dalam menentukan lokasi tersebut adalah karena masih adanya beberapa masyarakat di Desa Telaga Suka yang berstatus ekonomi menengah kebawah, sehingga kondisi tersebut sesuai dengan judul peneliti terkait penyaluran bantuan sosial melalui peran pendamping PKH secara akurat dan transparansi.

Yang menjadi persoalan dalam implementasi PKH di daerah-daerah kita adalah kurang efektif dan kurang tepat sasaran, dan penentuan penerima manfaatnya kurang valid. Artinya, warga-warga yang mestinya tidak berhak, malah ikut jadi penerima manfaat PKH. Untuk kedepan, verifikasi data penerima manfaat PKH harus diperjelas dan proses transparan jangan karena faktor suka atau tidak suka. Hasil pengamatan peneliti yang menemukan bahwa di Desa Telaga suka masih terdapat banyak masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima manfaat bantuan sosial PKH.

Berdasarkan uraian fenomena permasalahan terkait efektivitas peran pendamping dalam penyaluran bantuan sosial, maka dalam penelitian ini peneliti

akan melakukan penelitian dengan judul “**Efektivitas Pengawasan Internal Pendamping PKH dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Desa Telaga Suka**”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah penelitian ini nantinya dan agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan data ke dalam penulisan skripsi, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahan yang akan diteliti.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “**Bagaimana Efektivitas Pengawasan Internal Pendamping PKH Dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah?**”.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai pada pelaksanaan penelitian adalah untuk mengetahui Efektivitas Pengawasan Internal Pendamping PKH Dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut antara lain sebagai berikut;

a. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan karya ilmiah dibidang ilmu administrasi publik.

b. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah ataupun lembaga-lembaga lain yang membutuhkan serta menjadi acuan dalam

meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu..

c. Secara akademis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dasar perluasan penelitian dan penambahan wawasan untuk pengembangannya.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

BAB I : Berisikan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Berisikan uraian Teoritis yang menguraikan tentang Konsep Pengawasan Internal, Peran Pendamping PKH, dan uraian penjelasan tentang PKH.

BAB III : Berisikan Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian. Pada bab ini akan menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, metode penelitian ini meliputi, jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, informan penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan untuk menemukan jawaban dari perumusan masalah penelitian ini.

BAB IV : Pembahasan Analisis Data Penelitian Penyajian Data Dan Pengolahan dan Analisa Data. Pada bab ini akan mendeskripsikan sub-sub bab pembahasan meliputi, gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data hasil wawancara, serta pembahasan dari hasil penelitian yang telah

diuraikan yang berkaitan dengan jawaban dari perumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini.

**BAB V** : Berisikan penutup yang menguraikan tentang simpulan dari hasil penelitian dan juga pembahasan hasil penelitian serta menguraikan saran yang diajukan peneliti sebagai bahan pertimbangan terhadap hasil penelitian yang diuraikan.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Konsep Efektivitas**

##### **2.1.1 Pengertian Efektivitas**

Keberhasilan suatu tujuan diukur juga oleh konsep efektivitas, apa yang di maksud dengan efektivitas, terdapat perbedaan pendapat diantara yang menggunakannya, baik di kalangan akademisi maupun praktisi. “efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena hasil dapat tercapai tetapi mungkin dengan penghamburan pikiran, tenaga, waktu, uang atau benda” (Adisasmita, 2011).

Efektivitas berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini dalam sebuah hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. “efektivitas merupakan gambaran yang memberikan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting perannya di dalam setiap lembaga dan berguna untuk perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga” (Adi, 2012).



Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Ada juga yang menjelaskan arti efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap efektif.

### **2.1.3 Jenis-Jenis Efektivitas**

Efektivitas itu sendiri memiliki tiga tingkatan yang berbeda, dikelompokkan pada tingkat individu, kelompok, dan organisasi (Dany & Habibah, 2021) antara lain:

#### **1. Efektivitas Individu**

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

#### **2. Efektivitas kelompok**

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.

#### **3. Efektivitas organisasi**

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya dari pada jumlah hasil karya tiap –tiap bagiannya.

### 2.1.3 Kriteria Efektivitas

Menurut (Adi, 2012) bahwa mengukur efektivitas organisasi dapat diukur dari berbagai hal diantaranya:

1. Kejelasan tujuan yang khendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugasnya mencapai sasaran yang terarah dan tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “peta jalan” yang diikuti dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran organisasi.
3. Proses analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dan strategi yang digunakan artinya kebijaksanaan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang pada hakikatnya memutuskan sekarang apa yang akan dikerjakan organisasi dimasa mendatang.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu di jabarkan pada program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Kemampuan kerja secara produktif dengan sarana prasarana yang tersedia dan disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun suatu program bila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena pelaksanaan organisasi semakin melekat pada tujuannya.

8. Sistem pengawasan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas menuntut adanya sistem pengawasan dan pengendalian.

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif (Harbani Pasolong, 2017)

Beberapa pendapat dan teori efektivitas yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu (Manullang, 2012)

1. Akurat.
2. Tepat waktu.
3. Perubahan nyata

Dari deskripsi di atas tentang efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mengacu kepada keakuratan sebuah pelaksanaan atau tepat sasaran yaitu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dimana

tujuan awal pemerintah penyaluran bantuan terhadap masyarakat miskin. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat sampai sejauh mana efektivitas penyaluran bantuan sosial melalui pengawasan internal pendamping PKH. Efektivitas tersebut dibangun atas 3 indikator, yaitu:

- 1) Akurat,
- 2) Tepat waktu,
- 3) Perubahan nyata.

## **2.2 Konsep Pengawasan**

### **2.2.1 Pengertian Pengawasan**

Istilah pengawasan dalam kamus besar bahasa Indonesia “awas”, sehingga kegiatan pengawasan merupakan hanya mengawasi saja. Menurut Siagan dalam pengertian pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Rohmah, 2015)

Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaannya terealisasi berdasarkan rencana sebelumnya, dan mencapai hasil yang dikehendaki. Sedangkan menurut pengawasan yaitu proses mengenai suatu pimpinan yang ingin melihat hasil kerja bawahannya yang berdasarkan rencana, perintah, tujuan dan kebijakan yang ditentukan (Pasolong, 2017).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu proses pengamatan dalam kegiatan organisasi agar kita dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan organisasi berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

### **2.2.2 Tujuan Pengawasan**

Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui kekeliruan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan rencana ditentukan dari awal, sehingga dengan kekliruan tersebut untuk memperbaiki dan mencegah agar tidak terjadi lagi.

Tujuan utama dari pengawasan yaitu berusaha agar sesuatu yang direncanakan dapat menjadi nyata. Untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga pengawasan yang pertama bertujuan untuk terlaksananya pekerjaan berdasarkan instruksi yang dikeluarkan, dan mengetahui apa saja kelemahan serta hal sulit dalam melaksanakan rencana sehingga dengan cepat dapat mengambil tindakan untuk memperbaikinya (Rahayu, 2012).

### **2.2.3 Teknik-Teknik Pengawasan**

Pengawasan terdiri dari beberapa macam-macam bentuk berdasarkan beberapa hal, yaitu :

- a. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung,

- b. Pengawasan preventif, pengawasan represif, dan pengawasan umum, dan
- c. Pengawasan ekstern dan pengawasan intern

Menurut (Rohman, 2009) proses pengawasan dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan menggunakan dua macam teknik yaitu:

a. Pengawasan Langsung

Yang dimaksud dengan pengawasan langsung ialah jika pemimpin organisasi mengerjakan sendiri pengawasannya kepada bawahannya terkait kegiatan yang sedang dikerjakan bawahannya. Pengawasan langsung ini berbentuk:

- 1) Inspeksi langsung. Maksudnya atasan secara langsung melihat bawahannya secara dekat guna mempelajari suatu hal secara lebih lanjut untuk melihat apakah bawahannya melaksanakan pekerjaannya sesuai aturan atau tidak serta untuk menemukan apakah terjadi suatu masalah atau tidak.
- 2) *On-the-spot observation*, maksudnya atasan mengamati, meneliti, memeriksa, dan mengecek sendiri apa yang dikerjakan oleh bawahannya.
- 3) *On-the-spot report*, atasan menerima secara langsung laporan dari pelaksana atau bawahannya.

Dengan adanya pengawasan langsung, jika ada kesalahan dapat diketahui sedini mungkin sehingga perbaikan dilakukan dengan cepat dan juga dapat mempererat hubungan antara atasan dengan bawahan karena disebabkan dengan adanya kontak langsung dari atasan untuk bawahannya. Akan tetapi, karena banyaknya tugas yang ada pada pimpinan terutama dalam organisasi yang besar,



maka pimpinan tidak mungkin setiap hari melakukan pengawasan langsung, sehingga diperlukan pengawasan yang berifat tidak langsung.

#### b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini dapat berbentuk tulisan (laporan yang berupa tertulis dari bawahannya) dan lisan (laporan yang secara langsung disampaikan oleh bawahannya) tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dicapai. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung yaitu sering kali bawahan melakukan laporan yang positif saja.

Dengan demikian, mereka cenderung hanya melaporkan sesuatu yang diduga dapat menyenangkan pimpinannya. Padahal pimpinan yang baik, bawahannya akan dituntut agar menyampaikan hal-hal baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Jika hanya hal-hal positif yang dilaporkan, pimpinan tidak akan mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Akibatnya ialah bahwa dia mungkin akan melakukan tindakan salah dalam pengambilan kesimpulan maupun keputusan.

Selain Siagian adapun beberapa ahli yang berpendapat tentang pengawasan langsung dan tidak langsung antara lain seperti:

- a) Menurut (Adisasmita, 2011) bahwa pengawasan langsung yaitu jika pimpinan melaksanakan pemeriksaan secara langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik itu sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif. Sedangkan pengawasan tidak langsung ialah jika aparat pimpinan melaksanakan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan melalui laporan-laporan yang masuk padanya.

- b) Menurut (Brandan, 2015) pengawasan langsung ialah pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh, maksudnya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Laporan ini dapat berupa lisan atau tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dicapai.
- c. Pengawasan preventif, pengawasan represif, dan pengawasan umum.

1. Pengawasan Preventif.

Pengawasan Preventif menurut Sujamto adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, hal ini berarti pengawasan telah dilakukan sejak masih menjadi rencana. Dari pengertian tersebut bahwa pengawasan preventif untuk menghindari terjadinya kekeliruan yang mungkin bisa terjadi. Pengawasan preventif ini dilakukan terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur materi-materi yang dianggap penting yaitu materi menyangkut kepentingan besar terutama kepentingan Daerah dan penduduknya (Habibullah, 2010)

2. Pengawasan Represif

Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan atau pekerjaan yang telah dilaksanakan, bentuk pengawasan represif yaitu penundaan dan pembatalan, karena untuk memperbaiki jika terjadinya kesalahan. Pengawasan represif dalam pemerintahan merupakan pengawasan produk hukum setiap daerah oleh pemerintah yang berwujud pada penundaan atau pembatalan terhadap setiap Peraturan Daerah (Perda) yang telah ditetapkan. Dalam mencakup seluruh Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah, baik dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten dan kota.

### 3. Pengawasan Umum

Pengawasan Umum merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah yang berdasarkan program-program yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Pusat melalui rencana strategi nasional. Tujuan Pengawasan umum ini agar Pemerintah Pusat dapat mencapai target secara nasional terhadap pencapaian program nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP)

#### d. Pengawasan internal dan pengawasan eksternal

##### 1. Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan dari dalam. Pengawasan internal ini dilakukan oleh pimpinan dalam organisasi itu sendiri, tetapi biasanya untuk lebih efektif, tugas pimpinan itu dapat didelegasikan kepada para pimpinan bidangnya masing-masing. Pengawasan internal dalam pemerintah merupakan salah satu bentuk unsur manajemen pemerintah yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Maka untuk mewujudkan pemerintahan yang baik perlu ada pengawasan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (API) yang berkualitas dan sistem pengendalian yang baik.

## 2. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dari luar Organisasi. Misalnya Lembaga negara yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan keuangan maka dibentuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

### **2.2.4 Kriteria Pengukuran Pengawasan**

Pengawasan di dalam suatu perusahaan merupakan salah satu faktor yang penting, karena dengan adanya pengawasan, maka perusahaan akan dapat mencapai tujuan. Pengawasan sangat diperlukan oleh organisasi Menurut (Halidayati, 2014) bahwa :

#### a) Perubahan lingkungan organisasi

Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus menerus dan tidak dapat dihindari, melalui fungsi pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada lingkungan organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.

#### b) Peningkatan kompleksitas organisasi

Semakin besar organisasi maka akan semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan efektif dan efisien.

#### c) Kesalahan-kesalahan

Bila para bawahan tidak pernah melakukan kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Sistem pengawasan memungkinkan para manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan para bawahan sebelum menjadi kritis.

d) Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang

Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, maka tanggung jawab manajer tersebut tidak berkurang. Satu-satunya cara dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan.

Pengawasan diperlukan pada organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan maka fungsi-fungsi organisasi lainnya dapat berjalan dengan baik.

Untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif, maka setiap perusahaan harus merencanakan dan menyusun suatu sistem pengawasan. Sistem pengawasan yang disusun oleh perusahaan belum tentu sama dengan perusahaan lainnya. Indikator pengawasan merupakan ukuran atau kriteria baik buruknya pelaksanaan di organisasi perusahaan.

Menurut (Sagian, 1982) indikator pengawasan adalah sebagai berikut :

a) Pemahaman Program

Pemahaman program tentang pelaksanaan suatu pengawasan dimiliki setiap pegawai dalam melaksanakan tugas, melalui pemahaman yang dimiliki setiap

pegawai menyebabkan organisasi mampu mengambil tindakan koreksi yang benar dan juga bahkan menyelesaikan masalah yang ada.

b) Tepat waktu

Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan di evaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.

c) Pencapaian Tujuan

Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidangbidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standart paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.

## **2.3 Pendamping Sosial**

### **2.3.1 Pengertian Pendamping**

Pendamping atau pekerja sosial adalah praktik pekerjaan sosial, dalam kiprahnya dimasyarakat selalu berhadapan dan melayani orang (individu, kelompok, dan masyarakat) yang mengalami masalah sosial dengan maksud membantu mereka mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Pendamping sosial merupakan suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan klien yang bertujuan untuk dapat memecahkan masalah dan segala persoalan yang ada, memperkuat dukungan, mendayahgunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan, serta dapat meningkatkan aktivitas klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, serta fasilitas pelayanan publik lainnya (Widanarto, 2006)



Dalam artian pendamping adalah suatu tugas yang dilakukan seseorang yang menjadi penghubung masyarakat dengan berbagai lembaga dan diperlukan sebagai pengembangan dan peningkatan kualitas masyarakatnya. Menurut (Yusri, 2021) Pendampingan dalam masyarakat adalah orang yang terkategori sebagai pengantar perubahan *Agent of Change*, baik yang berada didalam sistem sosial masyarakat bersangkutan (*Outsider Change Agents*). Pendamping merupakan aktor penting dalam mensukseskan proses berjalannya program dari pemerintah dipengaruhi oleh masyarakat dan peran pendamping itu sendiri.

### **2.3.2 Peran Pendamping**

Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan. pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga nonprofit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternative pemecahan masalah yang dihadapi (Widanarto, 2006).

Dalam perundang-undangan terdapat pula undang-undang yang mengakui dan mengatur tentang pekerja sosial yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. pada pasal 1 angka 4 yang dimaksud pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di Lembaga Pemerintah maupun Swasta yang memiliki

kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial. Sedangkan menurut (Rohmah, 2015) terdapat 10 peran pendamping, peran-peran tersebut adalah:

1. Pemungkin (*enabler*)
2. Penjangkauan (*outreacher*)
3. Pembimbing (*supervisor*)
4. Fasilitator
5. Mediator
6. Advokasi
7. Katalisator
8. Elaborator
9. Penggerak (*Dinamisor*)
10. Pemotivasi

Pendamping PKH memiliki kedudukan sebagai mitra pemerintah dan mitra masyarakat sehingga dituntut untuk menjembatani berbagai kepentingan yang datang dari pemerintah maupun kepentingan masyarakat. Peran pendamping PKH berdasarkan konsep peran *community worker* adalah sebagai berikut (Handoko, 2012) :

1. Keterampilan fasilitatif
2. Keterampilan mendidik
3. Keterampilan representasi/perwakilan masyarakat

#### 4. Keterampilan teknis

### **2.4 Program Keluarga Harapan (PKH)**

#### **2.4.1 Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. PKH merupakan program lintas kementerian dan lembaga, karena actor utamanya adalah dari badan perencanaan pembangunan nasional, departemen sosial, departemen kesehatan, departemen pendidikan nasional, departemen agama, departemen komunikasi dan informatika, dan badan pusat statistik. Sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia sudah melaksanakan PKH sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, program ini juga dikenal dengan istilah Conditional Cash Transfer (CCT) dan dianggap telah berhasil menanggulangi kemiskinan yang sedang dihadapi oleh negara-negara termaksud di Indonesia (Haeruddin, 2021). Melalui program PKH, Rumah tangga sangat miskin didorong untuk memiliki akses Sebagaimana ditegaskan oleh *The National the Association of Social Workers (NAWS)* pekerja sosial mempunyai empat tujuan utama yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya, menanggulangi dan secara efektif menjalankan fungsinya. pekerja sosial berperan dalam mengidentifikasi kekuatan klien dan memberikan dorongan untuk menciptakan perubahan dalam hidupnya.

2. Menghubungkan klien dengan jaringan yang dibutuhkan. Disini pekerja sosial berfungsi strategis dalam advokasi sosial maupu menghubungkan klien kepada jaringan yang dibutuhkan agar dapat berkembang dan mencapai tujuan hidupnya.
3. Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial dalam pelayanannya agar berjalan secara efektif. peran pekerja sosial disini sebagai pengemban program, supervisor, kordinator ataupun konsultan.
4. Mendorong terciptanya keadilan sosial melalui pengemban kebijakan sosial yang berpihak
5. Memberdayakan kelompok-kelompok rentan dan mendorong kesejahteraan maupun ekonomi.

Menurut Peraturan Kementrian Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) bahwa PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin dan telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) PKH. Bantuan bersyarat diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang sering juga disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pelayanan sosial seperti: kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, pendampingan dan perlindungan.

#### **2.4.2 Tujuan Program keluarga harapan (PKH)**

Menurut (Adisasmita, 2011) adalah mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, dan merubah perilaku RTSM yang relative kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Sedangkan Tujuan khusus PKH

dalam rangka percepatan pencapaian target millennium development goals (MDG) adalah :

Adapun tujuan PKH adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan status sosial ekonomi RTSM.
2. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita, dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar dari keluarga sangat miskin.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dan pendidikan dan kesehatan.
4. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak keluarga sangat miskin.

#### **2.4.3 Sasaran PKH**

Sasaran dari program PKH ini yakni keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang berada di wilayah:

- a. Pesisir dan pulau-pulau kecil
- b. Daerah tertinggal atau terpencil
- c. Perbatasan Negara

#### **2.4.4 Kriteria Penerima Bantuan Sosial PKH**

Kriteria komponen penerima bantuan sosial PKH adalah sebagai berikut :

- a. Kriteria komponen kesehatan meliputi:
  - a) Ibu hamil/menyusui
  - b) Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun
- b. Kriteria komponen pendidikan meliputi:
  - a) Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat

- b) Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat
  - c) Anak sekolah menengah/madrasah aliyah atau sederajat
  - d) Anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
- c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
- a) Lanjut usia mulai dari 60 tahun
  - b) Penyandang Disabilitas lebih diutamakan penyandang disabilitas berat.

#### **2.4.5 Alur Kerja Penyaluran Bantuan Sosial PKH**

Alur kerja penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan oleh Subdit bantuan sosial dengan bekerjasama dengan subdit terkait lainnya termasuk subdit validasi terminasi, subdit kepesertaan, subdit sumberdaya. Subdit validasi dan terminasi memastikan data hasil validasi, pemuktahiran dan verifikasi dari daerah dapat diinput, yang selanjutnya ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial oleh subdit kepesertaan. Subdit bantuan sosial mengajukan bantuan sosial sesuai dengan penetapan SK Direktur Jaminan Sosial Keluarga yang diproses oleh subdit kepesertaan. Subdit sumber daya memastikan pendamping melakukan validasi pemutakhiran dan verifikasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

#### **2.4.6 Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Sosial PKH**

Mekanisme penyaluran dana bantuan sosial PKH secara non tunai meliputi :

- a. pembukaan rekening penerima bantuan sosial
- b. Sosialisasi dan edukasi
- c. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

- d. Proses penyaluran bantuan sosial PKH
- e. Penarikan dana bantuan sosial PKH
- f. Rekonsiliasi hasil penyaluran dana bantuan sosial PKH
- g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran bantuan social.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

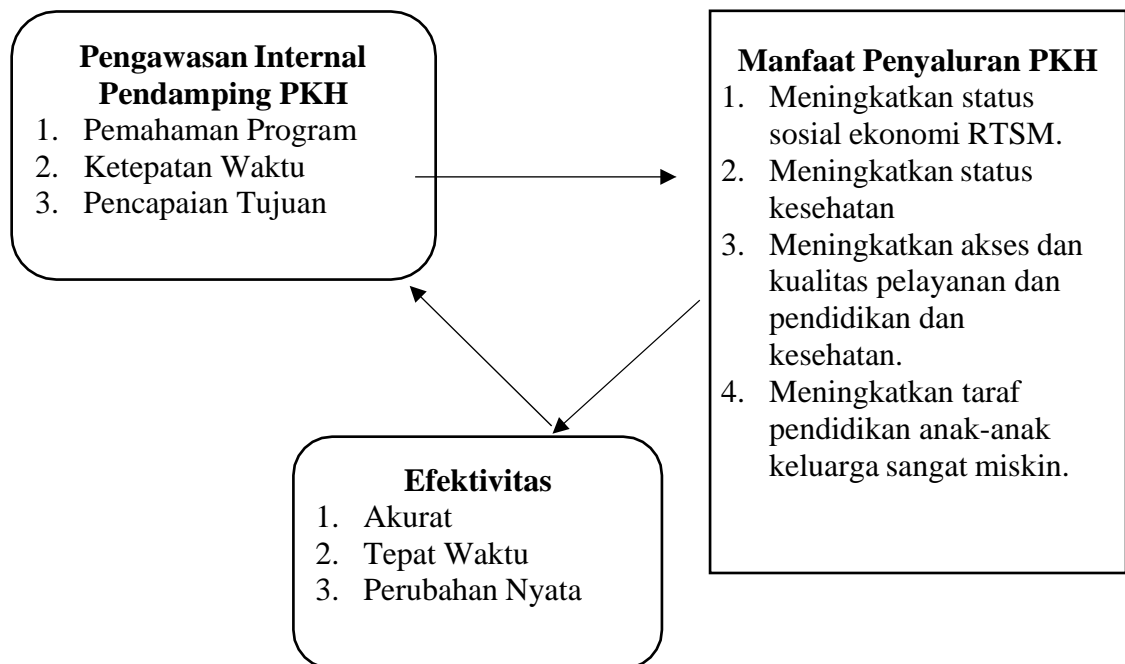
#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Melalui metode ini, penulis berusaha mendapatkan gambaran secara sistematis, dan jelas mengenai fenomena-fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Menurut (Syahrial & Desrina, 2022) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

#### **3.2 Kerangka Konsep**

Konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas Pengawasan Internal pendamping PKH dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah. Agar konsep tersebut dapat dijelaskan maka kerangka konsep dirangkum dalam sebuah gambar yang mewakili pola pemikiran sebagai berikut:





**Gambar 3.1 Kerangka Konsep**

### 3.3 Definisi Konsep

Menurut (Rohmah, 2015) Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata (lambang bahasa). Oleh sebab itu untuk menemukan batasan yang lebih jelas maka peneliti menyedarhanakan pemikiran atasa masalah yang sedang diteliti. Adapun konsep yang diungkapkan oleh peneliti, yaitu:

#### a. Efektivitas

Efektivitas merupakan keberhasilan organisasi untuk menciptakan kondisi internal organisasi yang bersih. Efektivitas berbicara tentang sejauh mana organisasi telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaannya terealisasi berdasarkan rencana sebelumnya, dan mencapai hasil yang dikehendaki.

c. Pendamping

Pendamping adalah suatu tugas yang dilakukan seseorang yang menjadi penghubung masyarakat dengan berbagai lembaga dan diperlukan sebagai pengembangan dan peningkatan kualitas masyarakatnya

d. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin dan telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) PKH

### 3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga dapat diketahui apa yang menjadi tolak ukur dalam menganalisis data dari suatu penelitian. Adapun kategorisasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1 Kategorisasi**

No.	Konsep Teoritis	Kategorisasi
1	Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial	1. Akurat 2. Tepat Waktu 3. Perubahan Nyata

2.	Pengawasan Internal Pendamping PKH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman Program</li> <li>2. Ketepatan Waktu</li> <li>3. Pencapaian Tujuan</li> </ol>
----	---------------------------------------	--

### 3.5 Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya, oleh karena itu pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel (Arikunto, 2019) Penentuan informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum

Pada penelitian ini Key Informan/Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) 1 orang Kordinator Pendamping PKH Desa Telaga Suka

Nama : Liza

Jenis Kelamis : Perempuan

Umur 35

- 2) 1 orang Kepala Desa Telaga Suka

Nama : Sofyan

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur 49

- 3) 1 orang Kepala Dusun Desa Telaga Suka

Nama : Ahmadi

Jenis Kelamis : Laki-Laki

Umur 42

4) 2 orang masyarakat Desa Telaga Suka

- a. Nama : Erna
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Umur : 48
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- b. Nama : Siti
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Umur : 43
- Pekerjaan : Penjahit

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Menurut (Effendi, 2019) bahwa teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara yaitu:

1. Pengumpulan Data Primer,

yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data primer ini dilakukan dengan cara:

- a) Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, dan selanjutnya mengadakan pencatatan terhadap gejala-gejala yang ditemukan dilapangan.

- b) Wawancara, yaitu kegiatan pengumpulan data melalui pertanyaan secara lisan kepada informan secara sistematis dan terorganisasi, yang dilakukan oleh peneliti sehubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka untuk mendukung data primer dalam menemukan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Adapun bentuk pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara:
- a) Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan dan dokumen penting yang berhubungan dengan objek penelitian.
  - b) Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpuln data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema. Menurut (Arikunto, 2019) analisis data ialah proses pencarian dan penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya (mengategorikannya) dalam pola atau tema. Adapun teknik yang dilakukan dalam menganalisis data, yaitu:

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan Miles dan Huberman dalam Moelong,

(2006). Reduksi data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Dalam proses reduksi data ini, peneliti melakukan pemilihan wawancara untuk kemudian kutipan wawancara tersebut digunakan untuk menguatkan hasil pembahasan dan analisis.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan alur penting selanjutnya setelah reduksi data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan adanya penyajian, kita dapat memahami apa yang terjadi, dan mengambil tindakan selanjutnya dari data yang ada. Penyajian data dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan adalah teks naratif. Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk kata-kata atau deskripsi.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan analisis data selanjutnya yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kemudian mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proposisi-proposisi. Setelah menyimpulkan hasil penelitian dari data yang telah didapatkan dan diolah, peneliti melakukan verifikasi dengan cara melihat ataupun kembali mendiskusikannya. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian lebih valid dan bisa dipertanggung jawabkan.

### **3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang diambil adalah Desa Telaga Suka kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu. Alasan peneliti dalam menentukan lokasi tersebut adalah karena masih adanya beberapa masyarakat di Desa Telaga Suka yang berstatus ekonomi menengah kebawah, sehingga kondisi tersebut sesuai dengan judul peneliti terkait penyaluran bantuan sosial melalui peran pendamping PKH secara akurat dan transparansi.

Waktu penelitian ini dilakukan mulai Agustus 2022 sampai dengan September 2022, penelitian dengan waktu singkat tersebut diharapkan mampu memaksimalkan peneliti dalam mengumpulkan data sebanyak-banyak untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

### **3.9 Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Telaga Suka yang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. Desa ini memiliki luas wilayah 41,00 Km<sup>2</sup>, dengan batas wilayah sebelah utara Kel. Labuhan Bilik, sebelah selatan Desa Sei Nahodaris, sebelah Barat Sungai Barumon dan sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Riau dan terdiri tujuh dusun yaitu:

1. Dusun I
2. Dusun II
3. Dusun III
4. Dusun IV
5. Dusun V

6. Dusun VI

7. Dusun VII

Jumlah penduduk di Desa Telaga Suka dengan jumlah 3.458 Jiwa yang terdiri dari 666 KK (Kepala Keluarga) dengan rincian Laki-laki berjumlah 1.798 jiwa dan perempuan berjumlah 1660 jiwa. Keadaan penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Telaga Suka.

Mayoritas pekerjaan penduduk Desa Telaga Suka salah satunya adalah Petani, sebagian besar bekerja sebagai pedagang, PNS, TNI, POLRI dan Buruh. Adapun Jumlah penduduk dengan mata pencaharian dapat dilihat dalam table berikut ini.

**Tabel 3.4. Jumlah Penduduk Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu Berdasarkan Pekerjaan dan Mata Pencaharian.**

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	283 Orang
2	Pedagang	24 Orang
3	PNS	30 Orang
4	TNI/POLRI	2 Orang
5	Nelayan	133 Orang
6	Buruh	180 Orang

*Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu 2022.*



## 2. Visi dan Misi Desa Telaga Suka

### a. Visi

Adapun visi dari pemerintahan desa Telaga Suka adalah “Desa Maju Berazaskan Musyawarah Dan Mufakat”

### b. Misi

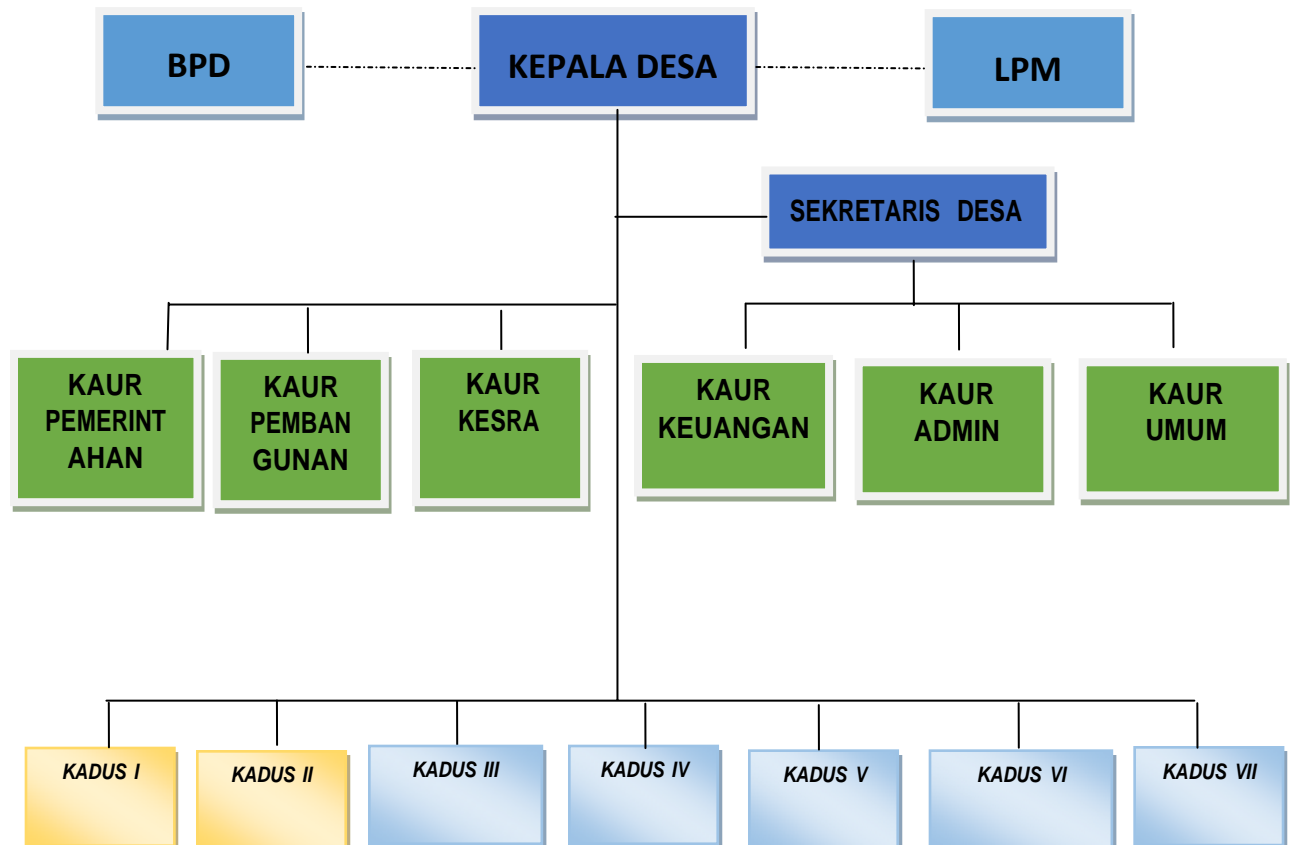
Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sebagai berikut;

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan transparan dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Pemberdayaan lembaga yang ada sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 3) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa penyuluhan kepada UKM dan Petani
- 4) Peningkatan produksi tanaman pangan, peternakan dan perkebunan.
- 5) Peningkatan Pembangunan infrastruktur jalan, air bersih, sarana kesehatan, Pertanian dan sarana keagamaan dan pendidikan

### 3. Struktur Organisasi

Adapun susunan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Telaga Suka adalah sebagai berikut :

#### Struktur Organisasi Pemerintah Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu



**Tabel 3.2 Daftar Aparatur Pemerintah Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu**

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Sofyan	Laki-laki	Kepala Desa
2	Ahmad Dahri	Laki-laki	Sekretaris Desa
3	Rudiansyah	Laki-laki	Kaur Pemerintahan
4	Hermayani	Perempuan	Kaur Kesejahteraan
5	Wendi Putra Prata	Laki-laki	Kaur Pembangunan
6	Azhar Madi	Laki-laki	Kaur Admin
7	Adi Mukmin	Laki-laki	Kaur Umum
8	Fitriadi Siregar	Perempuan	Kaur Keuangan
9	Mahmul Efendi	Laki-laki	Ketua BPD
10	Ahmadi	Laki-laki	Kadus I
11	Syaiful Azhar	Laki-laki	Kadus II
12	Zainul Lubis	Laki-laki	Kadus III
13	Zulpan	Laki-laki	Kadus IV
14	Dirman	Laki-laki	Kadus V
15	Mahmudin	Laki-laki	Kadus VI
16	Syafrizal Ahmadi	Laki-laki	Kadus VII

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data – data yang berhubungan erat dengan karakteristik responden menurut karakter jenis kelamin, tingkat pendidikan jabatan atau pekerjaan, selain itu data primer penelitian yang didapat berdasarkan hasil dari jawaban – jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait dengan Efektivitas Pengawasan Internal Pendamping PKH Dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu yang akan dianalisa secara objektif mendalam sebagai bentuk hasil dan pembahasan penelitian.

Karakteristik dan jawaban dari narasumber penelitian akan digunakan sebagai sumber pengumpulan data penelitian yang selanjutnya digunakan sebagai sumber pengumpulan data penelitian yang akan disajikan secara sistematis dan diuraikan pada ulasan – ulasan berikut ini.

##### **4.1.1 Karakteristik Responden**

###### **a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis kelamin**

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber berjenis kelamin laki – laki dan perempuan, seperti pada table 4.1 berikut.

**Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentasi
1.	Laki-laki	2	40 %
2.	Perempuan	3	60 %
	<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2022*

b. Distribusi Narasumber Menurut Umur

Distribusi narasumber menurut umur dari 7 lima narasumber dapat diklasifikasikan pada tabel 4.2 di bawah ini:

**Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Menurut Umur**

No	Umur	Frekuensi	Persentasi
1	30 – 35	1	20 %
2	36 – 40	-	
3	41 – 45	2	40 %
4	46 - 50	2	40 %
	<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2022*

c. Distribusi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh narasumber, maka distribusinya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu S1, D3 dan

SMA/SMK. Pada tabel 4.3 di bawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentasi
1.	S1	2	40 %
2.	D3	1	20 %
3.	SMA/SMK	2	40 %
	Jumlah	5	100 %

*Sumber : Hasil Penelitian 2022*

Bagaimana karakteristik dan jawaban para narasumber penelitian yang digunakan sebagai pengumpul data penelitian ini, selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan-penjelasan berikut ini.

#### **4.1.2 Deskripsi Data**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di kantor Kepala Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu pada Kordinator Pendamping PKH, Kepala Desa, Kepala Dusun dan masyarakat maka dapat dianalisa satu persatu tentang jawaban informan berdasarkan katagorisasi sehingga diperoleh data rekapitulasi sebagai berikut :

### **1. Aspek Pengawasan Internal Pendamping PKH**

#### **a. Pemahaman Program**

Kriteria pemahaman program mengukur seberapa mampu suatu organisasi atau pendamping dapat memahami tugasnya sehingga dapat memenuhi harapan kelompok dampungannya. Penilaian terhadap pemahaman program menyangkut tugas pokok dan fungsi sebagai pendamping. Pemahaman program tentang pelaksanaan suatu pengawasan dimiliki setiap pegawai dalam melaksanakan tugas, melalui pemahaman yang dimiliki setiap pegawai menyebabkan organisasi mampu mengambil tindakan koreksi yang benar dan juga bahkan menyelesaikan masalah yang ada (Jatmiko, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Liza selaku koordinator pendamping PKH Telaga Suka pada hari Senin, 15 Agustus 2022, pukul 14.00 WIB menyatakan bahwa Koordinator Pendamping PKH sudah memahami dengan jelas Program PKH dan tugas – tugas Pendampingan PKH tugas dan fungsi koordinator, sehingga dalam pelaksanaannya pihak pendamping PKH melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Liza selaku koordinator pendamping PKH Telaga Suka pada hari Senin, 15 Agustus 2022, pukul 14.30 WIB terkait menjelaskan tugas – tugas dari pendampingan PKH, menyatakan bahwa sebagai koordinator pendamping PKH dalam hal ini mampu dengan jelas menyebutkan satu persatu tugas-tugas yang harus dijalankan sebagai pengawas pelaksana pendamping PKH, dengan memahami tugas-tugas tersebut seharusnya pihak pendamping PKH mampu lebih profesional dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku .

Hasil wawancara pada pertanyaan terakhir yang dilakukan dengan Ibu Liza selaku kordinator pendamping PKH Telaga Suka pada hari Senin, 15 Agustus 2022, pukul 14.40 WIB terkait kendala yang dihadapi ibu, maupun anggota pendamping dan keluarga penerima manfaat menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas sebagai pengawas sejauh ini kendala yang dihadapi menyangkut penentuan peserta atau masyarakat yang layak sebagai penerima manfaat, permasalahan mengenai ketidakjelasan pemberkesan membuat pihak pendamping PKH kesulitan dalam menentukan masyarakat yang layak sebagai penerima PKH.

Sebagaimana beberapa hasil wawancara yang dikemukakan diatas, maka diketahui bahwa secara keseluruhan pihak pendamping PKH dalam hal ini kordinator PKH telah mampu memahami dengan jelas mengenai tugas dan fungsi yang harus dijalankan selaku pendamping PKH, kemampuan pendamping dalam memahami tugas-tugas pokok dinilai mampu memberikan kinerja yang lebih baik lagi dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat penerima manfaat.

#### **b. Ketepatan Waktu**

Ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan pendamping PKH sangat di pengaruhi kinerja dari penyelenggara Pendamping PKH. Ketepatan waktu merupakan suatu bukti bahwa pekerjaan telah selesai dilakukan sesuai waktu yang ditentukan. Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan di evaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.



Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibuk Liza selaku kordinator pendamping PKH Telaga Suka pada hari Senin, 15 Agustus 2022,, pukul 14.45 WIB terkait rentang waktu yang telah ditentukan untuk ibu melaksanakan tugas pendampingan menyatakan bahwa penyaluran bantuan sosial dilaksanakan empat kali dalam setahun, yaitu pada Januari, April, Juni dan Oktober, dengan ketentuan waktu penyaluran yang telah ditetapkan tersebut, maka peran pendamping juga akan dilaksanakan bertepatan dengan pelaksanaan penyaluran bantuan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Kemudian Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibuk Liza selaku kordinator pendamping PKH Telaga Suka pada hari Senin, 15 Agustus 2022, pukul 14.50 WIB terkait Dalam rentang sebulan, berapa kali selayaknya pendamping melakukan tugas pendampingan, menyatakan bahwa tugas pendamping berdasarkan waktu ditentukan oleh kebutuhan pengawasan yang disesuaikan dengan waktu penyaluran yang telah ditentukan.

Hasil wawancara pada pernyataan terakhir yang dilakukan dengan Ibuk Liza selaku kordinator pendamping PKH Telaga Suka pada hari Senin, 15 Agustus 2022, pukul 14.50 WIB terkait sanksi yang diterima pengawas jika dalam pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, menyatakan bahwa Jika pendamping terbukti tidak mematuhi aturan tersebut, Kemensos secara tegas akan melakukan pemecatan. Selain itu, ada beberapa kasus yang menyebabkan seorang pendamping diberhentikan dari tugasnya, contohnya mempunyai pekerjaan lain di luar urusan PKH atau tidak disiplin dalam bekerja.

Dari beberapa hasil wawancara yang diperoleh diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan waktu pendamping PKH dalam melakukan tugas pendampingan penyaluran bantuan sosial mengacu terhadap ketentuan waktu pelaksanaan pengawasan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, pelaksanaan pengawasan melalui keterangan pendamping PKH selama ini telah berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan, karena permasalahan kedisiplinan yang dilanggar oleh pendamping memiliki sanksi berkenaan dengan pemecatan sebagai pendamping, hal tersebut menyebabkan pihak pendamping PKH selalu tepat waktu dalam melakukan pengawasan penyaluran bantuan terhadap masyarakat.

### **c. Pencapaian Tujuan**

Pencapaian tujuan dari pengawasan pendamping PKH merupakan hal yang diinginkan setiap masyarakat desa. Suatu organisasi yang ideal seharusnya memiliki tujuan, tujuan inilah yang menjadi dasar kegiatan organisasi. Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidangbidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standart paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal (Masyhar, 2021).

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibuk Liza selaku kordinator pendamping PKH Telaga Suka pada hari Senin 15 Agustus 2022, pukul 15.00 WIB terkait dampak pendampingan yang pendamping lakukan terhadap Keluarga Penerima Manfaat dalam memberdayakan masyarakat miskin. Menyatakan bahwa upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial sejauh ini memberikan dampak positif,

dengan adanya program bantuan PKH, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok keluarga, seperti kebutuhan pangan, biaya sekolah anak dan sebagainya, sehingga masyarakat merasa terbantu dengan program bantuan PKH masyarakat miskin.

Selanjutnya Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibuk Liza selaku kordinator pendamping PKH Telaga Suka pada hari Senin 15 Agustus 2022, pukul 15.20 WIB terkait strategi yang dilakukan pendamping PKH agar masyarakat yang dulunya miskin menjadi lebih sejahtera menyatakan bahwa dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pendamping PKH mengarahkan masyarakat penerima PKH agar dapat memanfaatkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk kebutuhan yang sudah ditentukan seperti pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengoptimalkan dana yang digulirkan pemerintah kepada masyarakat sehingga dana tersebut dapat bermanfaat dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai

Hasil wawancara pada pertanyaan terakhir yang dilakukan dengan Ibuk Liza selaku kordinator pendamping PKH Telaga Suka pada hari Senin, 15 Agustus 2022,, pukul 15.25 WIB terkait prosedur pendampingan yang dilakukan sudah sesuai dengan pelaksanaan pendampingan di Desa Telaga Suka menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas pendampingan penyaluran bantuan sosial, pendamping PKH selalu mengacu terhadap tugas dan fungsi yang telah ditentukan oleh pemerintah terhadap pendamping PKH.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara yang dilakukan terhadap Koordinator Pendamping PKH terkait pencapaian tujuan diketahui bahwa dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pendamping PKH selama ini telah memenuhi sasaran, terlihat dari keberhasilan pendamping PKH dalam memberdayakan masyarakat miskin, dampak pengawasan yang dilakukan pendamping PKH melalui penyaluran bantuan sosial telah memberikan dampak positif terhadap masyarakat, kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik dari bidang kesehatan dan juga pendidikan telah mengalami peningkatan, keterangan dari pendamping PKH juga menyatakan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat juga telah dilakukan dengan cara memberikan pemahaman terkait pemanfaatan bantuan yang lebih produktif dan efisien, sehingga masyarakat mampu mengelola keuangan dengan baik dan benar.

## **2. Aspek Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial**

### **a. Akurat**

Kriteria akurat mengukur seberapa mampu suatu organisasi atau pendamping dapat melaksanakan tugasnya sehingga dapat memenuhi harapan kelompok dampungannya. Penilaian akurat berasal dari klien (dalam hal ini KPM). KPM berperan menilai mutu kinerja pendamping. Apakah dapat memenuhi harapan para KPM atau tidak (Syahril & Desrina, 2022).

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sofyan selaku Kepala Desa Telaga Suka pada hari Kamis, 18 Agustus 2022, pukul 09.35 WIB terkait ketepatan sasaran pendampingan program keluarga harapan, menyatakan bahwa peran

pendamping PKH yang berjalan di Telaga Suka selama ini telah memenuhi sasaran, hal tersebut terlihat dari kemampuan pendamping PKH dalam memaksimalkan pengawasan penyaluran bantuan sosial, sehingga rata-rata masyarakat di Telaga Suka telah terdaftar sebagai penerima manfaat PKH.

Sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Ahmadi selaku Kepala Dusun pada hari Kamis, 18 Agustus 2022, pukul 09.45 WIB yang menyatakan bahwa sejauh ini pengawasan yang dilakukan pendamping PKH dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial selama ini telah berjalan dengan baik, masyarakat Desa memperoleh dampak dari pengawasan yang dilakukan oleh pendamping PKH.

Berbeda dengan keterangan dari hasil wawancara pada hari Selasa 16 Agustus 2022, pukul 09.57 WIB yang dilakukan dengan ibuk Erna selaku masyarakat Desa yang menyatakan bahwa kinerja yang dilakukan pendamping PKH dalam melakukan pengawasan belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang ditentukan, terlihat dari adanya beberapa masyarakat Desa yang terbilang masih miskin yang belum terdaftar sebagai penerima PKH.

Hal serupa dengan hasil wawancara dengan ibuk Siti selaku masyarakat Desa Telaga Suka pada hari Selasa 16 Agustus 2022, pukul 10.45 WIB yang menyatakan bahwa tugas dijalankan oleh pendamping PKH belum tepat dengan sasaran yang ditentukan, hal tersebut diketahui dari kategori penerima manfaat PKH yang seharusnya adalah masyarakat miskin, namun dalam prakteknya masih ada

masyarakat dengan kondisi perekonomian yang terbilang cukup namun terdapat sebagai penerima PKH.

Pertanyaan kedua terkait keakuratan hasil kerja yang dilakukan dengan Bapak Sofyan selaku Kepala Desa pada hari Kamis, 18 Agustus 2022 pukul 11.15 WIB menjelaskan tentang bagaimana tolak ukur tepat sasaran pendampingan yang dilakukan pendamping, diketahui bahwa tolak ukur keberhasilan yang diukur dengan ketepatan sasaran dilihat dari kesesuaian syarat penerima PKH dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pendamping PKH, dan juga masalah waktu dalam penyaluran bantuan secara tepat waktu. Dari dua alat ukur tersebut dapat diketahui apakah kinerja pendamping PKH telah tepat sasaran atau tidak.

Selanjutnya hasilnya wawancara dengan bapak Ahmadi selaku kepala Dusun pada hari Kamis, 18 Agustus 2022 pukul 11.23 WIB menjelaskan bahwa tepatnya sasaran kinerja dari pendamping PKH ditentukan oleh kemampuan pendamping dalam melakukan pengawasan terhadap kelayakan penerima manfaat PKH, namun dalam prakteknya sejauh ini kinerja pendamping PKH dalam melakukan pengawasan penyaluran bantuan sudah akurat atau tepat sasaran.

Hasil wawancara dengan ibu Erna selaku masyarakat Desa pada hari Selasa 16 Agustus 2022, pukul 11.23 WIB menyebutkan bahwa tugas pendamping dalam melakukan pengawasan penyaluran bantuan selama ini belum sepenuhnya akurat, hal tersebut terlihat dari tolak ukur keberhasilan penyaluran bantuan yang ditentukan berdasarkan kesesuaian penerima manfaat dengan ketentuan yang berlaku, namun

dalam prakteknya masih ada masyarakat yang sebenarnya tidak termasuk penerima PKH namun terdaftar sebagai penerima manfaat PKH.

Begitu juga dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Siti selaku masyarakat pada hari Selasa 16 Agustus 2022, pukul 11.35 WIB yang menyebutkan bahwa seharusnya tolak ukur keberhasilan pendamping PKH dalam melakukan pengawasan ditentukan oleh seberapa besar masyarakat Desa yang terdaftar sebagai penerima manfaat, namun jika dilihat masih ada beberapa masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima manfaat walaupun seharusnya mereka layak dijadikan sebagai penerima manfaat PKH.

Selanjutnya pertanyaan ketiga pada kategori akurat atau tepat sasaran, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Sofyan selaku kepala Desa Telaga Suka pada hari Kamis, 18 Agustus 2022, pukul 11.40 WIB terkait kesesuaian pendampingan yang dilakukan pendamping PKH dalam Menyalurkan bantuan dengan tujuan yang ingin dicapai, menyatakan bahwa pelaksanaan pendampingan dalam melakukan pengawasan penyaluran bantuan sosial selama ini sudah sesuai dengan tujuan yang ditentukan.

Bapak Ahmadi selaku kepala Dusun melalui hasil wawancara pada hari Kamis, 18 Agustus 2022, pukul 11.45 WIB juga menyebutkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PKH selama ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, dan dalam pelaksanaannya belum pernah terjadi kesalahan, seperti tidak sesuai penerima manfaat dengan ketentuan syarat penerima, secara keseluruhan

penerima manfaat yang ada di Masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan syarat sebagai penerima PKH.

Berbeda dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibuk Erna selaku masyarakat Desa pada hari Selasa 16 Agustus 2022, pukul 11.50 WIB yang menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pendampingan PKH selama ini belum sesuai dengan ketentuan pencapaian tujuan yang menjadi kewajiban pendamping PKH dalam melakukan tugas sebagai pendamping.

Begitu juga dengan hasil wawancara dengan ibuk Siti selaku masyarakat Desa pada hari Selasa 16 Agustus 2022, pukul 11.56 WIB yang menyebutkan bahwa kesesuaian pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PKH selama ini belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang seharusnya dicapai oleh pendamping PKH.

Berdasarkan beberapa keterangan dari informan terkait keakuratan dari hasil kinerja yang dihasilkan pihak pendamping menggambarkan bahwa pada beberapa informan yaitu kepala Desa dan Kepala Dusun menyatakan bahwa sejauh ini pengawasan atau pendampingan yang dijalankan pihak pendamping dalam menjalankan tugas penyaluran bantuan sosial telah berjalan dengan optimal, terkait ketepatan sasaran dan juga kesesuaian hasil kinerja dengan ketentuan yang telah ditetapkan, namun informan dari pihak masyarakat menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas sebagai pendamping belum sepenuhnya berjalan dengan efektif dengan kata lain permasalahan masih adanya masyarakat miskin yang belum terdaftar



sebagai penerima manfaat menjadi tolok ukuran belum maksimalnya kinerja yang dihasilkan oleh pendamping PKH.

#### **b. Tepat Waktu**

Ketepatan waktu menjadi kriteria efektivitas yang mengukur perbandingan keluaran dan masukan. Ketepatan waktu yang dimaksud ialah ketepatan penggunaan biaya dan waktu dalam melaksanakan pendampingan. Dalam hal ini, pendamping PKH mengeluarkan biaya dan hasilnya sesuai. Begitupun soal waktu yang menguji komitmen pendamping. Dari waktu yang telah ditentukan, apakah pendamping PKH bisa tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya ataukah tidak (Wulandari, 2021).

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sofyan selaku Kepala Desa Telaga Suka pada hari Kamis, 18 Agustus 2022, pukul 10.10 WIB terkait rentang waktu yang ditentukan dalam melaksanakan tugas pendampingan, menyatakan bahwa waktu penyaluran bantuan sosial dilaksanakan empat kali dalam setahun, waktu penyaluran tersebut menjadi acuan pendamping dalam melaksanakan tugas pengawasan, sesuai dengan waktu yang ditentukan tersebut selama ini peran pendamping dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku tersebut, peran yang dijalankan pengawas selalu dijalankan secara tepat waktu.

Hasil yang sama diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak Ahmadi selaku Kepala Dusun pada hari Kamis, 18 Agustus 2022, pukul 10.15 WIB yang menjelaskan bahwa waktu pelaksanaan pengawasan yang dijalankan pendamping PKH telah sesuai dengan penentuan waktu penyaluran dan waktu pengawasan yang dilakukan pendamping PKH.

Sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibuk Erna selaku masyarakat Desa pada hari Selasa 16 Agustus 2022,, pukul 12.12 WIB yang menyatakan bahwa permasalahan rentang waktu penyaluran bantuan yang dilaksanakan oleh pendamping PKH sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Begitu juga dengan keterangan hasil wawancara dengan ibuk Siti selaku Masyarakat Desa pada hari Selasa 16 Agustus 2022,, pukul 12.18 WIB yang menyatakan bahwa waktu penyaluran bantuan sosial yang dilakukan terhadap masyarakat selama ini berjalan sesuai dengan waktu yang direncanakan, sehingga sangat jarang mengalami keterlambatan peyaluran bantuan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Pada pernyataan kedua terkait ketepatan waktu pengawasan yang dilakukan pendamping dalam penyaluran bantuan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sofyan Selaku Kepala Desa Telaga Suka pada hari Kamis, 18 Agustus 2022 pukul 10.30 WIB terkait Berapa kali dalam sebulan masyarakat Desa Telaga Suka didampingi pendamping PKH, pendampingan yang dilakukan pendamping pada masyarakat dalam penyaluran bantuan sosial di tentukan berdasarkan ketentuan waktu penyaluran yang ditetapkan, dalam setahun waktu penyaluran dilakukan 4 kali dalam setahun, bertepatan dengan waktu tersebut peran pendamping dibutuhkan untuk mengawasi penyaluran bantuan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Ahmadi selaku Kepala Dusun pada hari Kamis, 18 Agustus 2022, pukul 10.35 WIB menyatakan bahwa waktu

penyaluran dilakukan empat kali dalam setahun, pada waktu penyaluran peran pendamping harus dilaksanakan sehingga penyaluran bantuan berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan keterangan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Erna Selaku Masyarakat Desa pada hari Selasa 16 Agustus 2022,, pukul 12.45 WIB yang menyebutkan bahwa penyaluran bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan, sehingga peran pendamping selalu dilaksanakan berdasarkan waktu penyaluran bantuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Begitu juga dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti pada hari Selasa 16 Agustus 2022, pukul 12.50 WIB yang menyatakan bahwa waktu pengawasan yang dilaksanakan oleh pendamping selama ini sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Merujuk pada beberapa hasil wawancara di atas, maka disimpulkan bahwa ukuran ketepatan waktu pelaksanaan pendampingan yang dijalankan oleh pihak pendamping PKH telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, permasalahan waktu dalam rentang penyaluran selalu berjalan bersesuaian dengan waktu turunnya anggaran dana yang akan disalurkan terhadap masyarakat penerima manfaat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari segi waktu peran pendamping dalam melakukan pengawasan penyaluran bantuan sudah berjalan dengan baik, sehingga disimpulkan bahwa peran pendamping sangat efektif dalam mengawasi penyaluran bantuan.

### **c. Perubahan Nyata**

Kriteria ini mengukur apa yang telah dikerjakan dan dihasilkan. Maksudnya adalah sejauh mana pendamping PKH melaksanakan tugasnya dan apa saja yang telah dicapainya. Pelaksanaan pendampingan tidak lepas dari tugas pokok pendamping PKH yang telah diatur oleh Kementerian Sosial (Suri & Daulay, 2022).

Sebagaimana Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sofyan selaku Kepala Desa Telaga Suka pada hari Kamis, 18 Agustus 2022, pukul 10.21 WIB terkait dampak atau efek yang positif dari pendampingan para pendamping PKH menyatakan bahwa dampak dari penyaluran bantuan melalui pendampingan PKH memberikan pengaruh positif, hal tersebut terlihat dari meningkatnya kualitas masyarakat dari segi ekonomi, pengawasan yang dilakukan pendamping PKH mampu meningkatkan jumlah penerima manfaat PKH, sehingga sangat jarang terlihat dari masyarakat miskin yang belum menerima manfaat PKH.

Selanjutnya Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ahmadi selaku Kepala Dusun Telaga Suka pada hari Kamis, 18 Agustus 2022, pukul 10.27 WIB menyatakan bahwa pendampingan yang dilakukan memberikan dampak positif, hal tersebut terlihat dari meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keluarga masyarakat Desa, pengawasan tersebut berfokus pada penentuan kelayakan masyarakat sebagai penerima manfaat PKH.

Sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibuk Erna selaku masyarakat Desa pada hari Selasa 16 Agustus 2022,, pukul 10.35 WIB yang menjelaskan bahwa peran pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PKH

dalam melakukan pengawasan penyaluran bantuan sudah sangat efektif, atau telah memberikan dampak atau efek positif, namun belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, seperti misalkan masih adanya beberapa masyarakat miskin di Desa Telaga Suka yang belum terdaftar sebagai penerima manfaat PKH.

Kemudian hasil wawancara terakhir yang dilakukan dengan ibuk Siti selaku masyarakat Desa pada hari Selasa 16 Agustus 2022, pukul 10.35 WIB menyatakan bahwa pendamping PKH dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial sejauh ini telah mampu memberikan dampak positif, namun tentu masih memiliki beberapa kekurangan, seperti pengawasan dalam pemberkasan saat melakukan pendaftaran penerima manfaat yang dilakukan masyarakat belum dilakukan secara transparan.

Pertanyaan kedua pada kategori perubahan nyata terkait pendampingan yang dilakukan pendamping PKH mempermudah urusan masyarakat Telaga Suka dalam mengikuti program PKH. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sofyan selaku Kepala Desa Telaga Suka pada hari Kamis 18 Agustus 2022, pukul 10.40 WIB menjelaskan bahwa dengan adanya tugas pendamping PKH sebagai pengawas penyaluran bantuan sosial memberikan beberapa kemudahan bagi masyarakat sebagai penerima manfaat program PKH. Pendamping PKH sebagai fasilitator memberikan kemudahan bagi masyarakat, seperti pelaksanaan pemberkasan pencairan, dan juga pendaftaran calon penerima manfaat PKH yang dilakukan masyarakat.

Selanjutnya Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ahmadi selaku Kepala Dusun Telaga Suka pada hari Kamis, 18 Agustus 2022, pukul 10.43 WIB yang menyatakan bahwa keberadaan pendamping PKH sebagai pengawasan penyaluran bantuan sosial mampu mempermudah urusan masyarakat dalam menerima bantuan sosial, baik dari segi pemberkesan dan juga pencairan dana yang disalurkan.

Hal serupa dengan hasil wawancara terakhir yang dilakukan dengan ibuk Siti selaku masyarakat Desa pada hari Selasa, 16 Agustus 2022, pukul 10.48 WIB yang menyebutkan bahwa masyarakat merasa terbantu dengan peran yang dijalankan oleh pendamping PKH sebagai fasilitato dan juga penyedia sarana dan prasana masyarakat dalam mengikuti program penyaluran bantuan PKH.

Kemudian sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibuk Siti selaku masyarakat Desa pada hari Selasa 16 Agustus 2022,, pukul 10.50 WIB yang menjelaskan bahwa pendampingan yang dilaksanakan oleh pihak pendamping PKH mampu mempermudah urusan masyarakat dalam memperoleh bantuan sosial program PKH.

Pertanyaan ketiga pada kategori perubahan nyata menyangkut harapan masyarakat untuk kedepannya mengenai pendampingan dan program keluarga harapan agar dapat lebih mensejahterakan masyarakat melalui program bantuan PKH. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sofyan selaku Kepala Desa Telaga Suka pada hari Kamis, 18 Agustus 2022, pukul 11.13 WIB menyatakan bahwa, dalam jangka pendek pihak pendamping PKH seharusnya lebih

memaksimalkan pengawasan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, agar penyaluran bantuan yang dilaksanakan terdistribusikan secara merata bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ahmadi selaku Kepala Dusun Telaga Suka pada hari Kamis, 18 Agustus 2022, pukul 11.19 WIB menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan, pihak pendamping PKH lebih mengedepankan masyarakat miskin sebagai penerima manfaat PKH, sehingga nantinya akan mampu meningkatkan taraf kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, seperti pendidikan, kesehatan dan juga pangan masyarakat.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Erna selaku masyarakat Desa Telaga Suka pada hari Selasa 16 Agustus 2022, pukul 11.23 WIB juga menyarankan agar pendamping PKH dalam melakukan pengawasan lebih transparan dan feleksibel dalam mempublikasikan data-data penerima manfaat PKH, sehingga masyarakat mendapat kesempatan untuk mengevaluasi kinerja yang dijalankan oleh pendamping PKH.

Hasil wawancara terakhir yang dilakukan dengan Ibuk Siti selaku masyarakat Desa Telaga Suka pada hari Selasa 16 Agustus 2022, pukul 11.26 WIB juga menjelaskan bahwa peran pendamping selaku pengawas penyaluran bantuan sosial, diharapkan lebih profesional dan aktif dalam menentukan nama-nama penerima manfaat PKH. Sehingga program bantuan PKH tepat pada sasaran yang telah

ditentukan oleh pemerintah, dengan tujuan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas, maka disimpulkan bahwa efektifitas kinerja yang di ukur berdasarkan perubahan nyata dari dampak kinerja pendamping PKH menunjukkan respon positif dari masyarakat dalam ini keterangan yang diambil dari informan yang digunakan dalam penelitian ini. Masyarakat menganggap bahwa dampak dari pengawasan yang dijalankan pendamping PKH memberikan perubahan nya, yaitu terkait adanya kemudahan-kemudahan yang diterima masyarakat dari peran pendampingan PKH, dan juga mampu memberikan dampak perubahan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial, dibidang kesehatan dan pendidikan masyarakat penerima manfaat PKH.

## **4.2 Pembahasan**

### **1. Aspek Pengawasan Internal Pendamping PKH**

#### **a. Pemahaman Program**

Pemahaman program penting dimiliki oleh seorang pendamping. Pendamping berperan sebagai aktor yang mendorong perubahan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Pendidik berperan dalam membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi dan menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat (Halidayati, 2014). Hal demikian merupakan bagian dari tugas pendamping dalam menjalankan tugas pengawasan penyaluran bantuan sosial. Pemahaman program dari pelaksanaan pendampingan yang dilakukan pendamping dinilai mampu meningkatkan kualitas hasil kinerja, sehingga mampu memberikan



pengaruh positif terhadap keberhasilan penyaluran bantuan sosial yang efektif dan produktif.

Kriteria ini mengukur kemampuan pendamping dalam memahami tugas-tugas dan fungsi pokok dalam menjalankan tugas pendampingan. Maksudnya adalah sejauh mana pendamping PKH melaksanakan tugasnya dan apa saja yang telah dicapainya. Pelaksanaan pendampingan tidak lepas dari tugas pokok pendamping PKH yang telah diatur oleh Kementerian Sosial. Ketentuan yang telah ditetapkan kementerian sosial sebagai dasar acuan pelaksanaan pengawasan pendamping harus dijalankan oleh pendamping sesuai dengan prosedur yang berlaku (Jatmiko, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan, diketahui bahwa secara keseluruhan pihak pendamping PKH dalam hal ini kordinator PKH telah mampu memahami dengan jelas mengenai tugas dan fungsi yang harus dijalankan selaku pendamping PKH, kemampuan pendamping dalam memahami tugas-tugas pokok dinilai mampu memberikan kinerja yang lebih baik lagi dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat penerima manfaat.

Untuk mengukur capaian efektivitas tersebut seorang pendamping harus mampu memahami program-program yang dijalankan dengan tujuan untuk membandingkan antara kebenaran atau ketepatan dengan kekeliruan atau kesalahan yang terjadi. Semakin tinggi pemahaman program seorang pendamping dalam memahami tugas-tugas pokoknya maka akan menurunkan tingkat kekeliruan atau kesalahan yang terjadi, tentunya akan semakin mendekati ketepatan atau efektif dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan.<sup>38</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa peran pendamping dalam melaksanakan pengawasan penyaluran bantuan sosial pada kategori pemahaman program telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan kata lain peran pendamping sangat efektif dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu.

Di samping itu, waktu menjadi penting untuk diperhatikan. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila penyelesaian pekerjaan tersebut tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

#### **b. Ketepatan Waktu**

Ketepatan waktu menjadi kriteria efektivitas yang mengukur kesesuaian kinerja pendamping dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu yang dimaksud ialah ketepatan penggunaan biaya dan waktu dalam melaksanakan pendampingan. Dalam hal ini, pendamping PKH mengeluarkan biaya dan hasilnya sesuai. Begitupun soal waktu yang menguji komitmen pendamping. Dari waktu yang telah ditentukan, apakah pendamping PKH bisa tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya atautkah tidak (Dany & Habibah, 2021).

Masa Penyaluran adalah jangka waktu pemindahbukuan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial pada Bank Penyalur kepada rekening Penerima Bantuan Sosial dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Negara ke rekening Pemberi Bantuan Sosial di Bank Penyalur. Waktu penyaluran bantuan PKH dilaksanakan 4 kali dalam setahun yaitu pada, Januari, April, Juni dan Oktober.

Berdasarkan ketentuan tersebut peran pendamping harus dijalankan untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial terhadap masyarakat penerima manfaat PKH. Pendampingan yang dijalankan harus sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan oleh kementerian sosial. Masalah kedisiplinan dari kinerja pendamping sangat dituntut dalam tugas pendistribusian dana bagi masyarakat. Jika dalam pelaksanaannya pendamping melakukan pelanggaran dengan mengalami keterlambatan penyaluran akibat kelalaian pendamping itu sendiri, maka akan dikenakan sanksi administratif yang berujung pada pemecatan sebagai pengurus pendamping.

Keefektifan suatu kinerja dalam hal ini peran pengawasan pendamping bisa dinilai dari kedisiplinan petugas organisasi dalam menjalankan tugas yang dibebankan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Merujuk pada hasil wawancara yang telah diuraikan pada Deskripsi data, diketahui bahwa permasalahan waktu pendamping PKH dalam melakukan tugas pendampingan penyaluran bantuan sosial mengacu terhadap ketentuan waktu pelaksanaan pengawasan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, pelaksanaan pengawasan melalui keterangan pendamping PKH selama ini telah berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan, karena permasalahan kedisiplinan yang dilanggar oleh pendamping memiliki sanksi berkenaan dengan pemecatan sebagai pendamping, hal tersebut menyebabkan pihak pendamping PKH selalu tepat waktu dalam melakukan pengawasan penyaluran bantuan terhadap masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan pendamping PKH di Desa Telaga Suka Tiga sudah berjalan tepat waktu. Ketepatan waktu sudah cukup baik dari waktu pelaksanaan program hingga berakhirnya program sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun terdapat kendala seperti kurangnya anggaran serta masih banyaknya masyarakat yang melakukan kesalahan dalam proses pemberkasan, kondisi ini dipengaruhi oleh kurangnya koordinasi yang dilakukan pendamping PKH dalam melakukan sosialisasi pelaksanaan atau mekanisme penyaluran bantuan sosial.

### **c. Pencapaian Tujuan**

Pencapaian tujuan mengukur seberapa mampu suatu organisasi atau pendamping dapat melaksanakan tugasnya sehingga dapat memenuhi harapan kelompok dampungannya. Penilaian mutu berasal dari klien (dalam hal ini KPM). KPM berperan menilai mutu kinerja pendamping. Apakah dapat memenuhi harapan para KPM atau tidak (Brandan, 2015).

Efektivitas suatu kinerja dalam hal ini peran pengawasan yang dilakukan pendamping PKH dalam pencapaian sasaran dari upaya bersama. Jadi suatu program atau pendampingan bisa mencapai hasil yang sesuai dengan harapan dan targetan, tidak dapat dikerjakan sendiri. Perlu adanya upaya bersama untuk mencapainya. Upaya tersebut tidak hanya asal kerja. Tetapi mampu memanfaatkan dana, daya, sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang telah ditentukan dan dialokasikan dengan hasil yang optimal (bahkan jika mungkin maksimal). (Habibullah, 2010)

Pencapaian tujuan pengawasan yang dilakukan oleh pihak pendamping PKH berkaitan dengan hasil kerja pendamping yang ditentukan berdasarkan tugas atau tujuan pelaksanaan pengawasan yang dijalankan. Berikut merupakan tujuan program PKH dari pendampingan yang dilakukan pendamping

Tujuan Program Keluarga Harapan Program Keluarga Harapan atau PKH memiliki tujuan sebagai berikut (Syahrial & Desrina, 2022):

- 1) Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; dan
- 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Dari keterangan yang diterima, diketahui bahwa jumlah penerima manfaat PKH di Desa Telaga Suka yang dibagi berdasarkan jumlah masing-masing dusun adalah sebagai berikut ;

**Tabel 4.4 Jumlah Penerima  
Manfaat PKH**

<b>No</b>	<b>Nama Dusun</b>	<b>Jumlah Penerima Manfaat PKH</b>
1	Dusun 1	13 Orang
2	Dusun 2	14 Orang
3	Dusun 3	12 Orang
4	Dusun 4	18 Orang
5	Dusun 5	45 Orang
6	Dusun 6	17 Orang
<b>Total</b>		<b>119 Orang</b>

Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pendamping PKH selama ini telah memenuhi sasaran, terlihat dari keberhasilan pendamping PKH dalam memberdayakan masyarakat miskin, dampak pengawasan yang dilakukan pendamping PKH melalui penyaluran bantuan sosial telah memberikan dampak positif terhadap masyarakat, kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik dari bidang kesehatan dan juga pendidikan telah mengalami peningkatan, keterangan dari pendamping PKH juga menyatakan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat juga telah dilakukan dengan cara memberikan pemahaman terkait pemanfaatan bantuan yang lebih produktif dan efisien, sehingga masyarakat mampu mengelola keuangan dengan baik dan benar.

## **2. Aspek Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial**

### **a. Akurat**

(Wulandari, 2021) mengartikan efektivitas ke dalam suatu konsep hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada output atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, kegiatan, atau program dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Dengan kata lain, keakuratan kerja adalah hasil yang dicapai dari suatu program atau aktivitas dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Dengan tolak ukur yang digunakan adalah pencapaian nilai dari suatu aktivitas atau program serta kualitas output yang mana pengukurannya menitikberatkan pada suatu dampak dari suatu aktivitas atau program. Untuk mengukur capaian efektivitas tersebut bisa dengan cara membandingkan antara kebenaran atau ketepatan dengan kekeliruan atau kesalahan yang terjadi. Semakin rendah tingkat kekeliruan atau kesalahan yang terjadi, tentunya akan semakin mendekati ketepatan atau efektif dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan.

Berdasarkan beberapa keterangan dari informan terkait keakuratan dari hasil kinerja yang dihasilkan pihak pendamping menggambarkan bahwa pada beberapa informan yaitu kepala Desa dan Kepala Dusu menyatakan bahwa sejauh ini pengawasan atau pendampingan yang dijalankan pihak pendamping dalam

menjalankan tugas penyaluran bantuan sosial telah berjalan dengan optimal, terkait ketepatan sasaran dan juga kesesuaian hasil kinerja dengan ketentuan yang telah ditetapkan, namun informan dari pihak masyarakat menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas sebagai pendamping belum sepenuhnya berjalan dengan efektif dengan kata lain permasalahan masih adanya masyarakat miskin yang belum terdaftar sebagai penerima manfaat menjadi tolok ukuran belum maksimalnya kinerja yang dihasilkan oleh pendamping PKH.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keakuratan kinerja yang dihasilkan pendamping PKH belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, hal tersebut terbukti dari belum sepenuhnya masyarakat miskin yang ada di Desa Telaga Suka yang seharusnya layak sebagai penerima manfaat PKH namun belum terdata sebagai penerima manfaat, hal tersebut terjadi akibat kelalaian kerja dari proses pendampingan yang dilakukan pendamping, pada tahap validasi dan verifikasi peserta penerima manfaat pihak pendamping tidak melakukan pengawasan dengan optimal, sehingga masih ada beberapa masyarakat miskin di Desa Telaga Suka yang belum menerima bantuan dari program PKH.

#### **b. Tepat Waktu**

Waktu adalah suatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. (Rohmah, 2015) mendefinisikan efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Artinya apakah



pelaksanaan suatu nilai baik atau tidak tergantung apabila tugas diselesaikan, bagaimana cara melaksanakan dan berapa biaya yang dikeluarkan.

Efisiensi waktu menjadi kriteria efektivitas yang mengukur keberhasilan pendamping PKH dalam melakukan pengawasan penyaluran bantuan sosial berdasarkan ketepatan waktu yang telah ditentukan. Tepat waktu yang dimaksud ialah ketepatan penggunaan biaya dan waktu dalam melaksanakan pendampingan. Dalam hal ini, pendamping PKH mengeluarkan biaya dan hasilnya sesuai. Begitupun soal waktu yang menguji komitmen pendamping. Dari waktu yang telah ditentukan, apakah pendamping PKH bisa tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya ataukah tidak.

Merujuk pada beberapa hasil wawancara di atas, maka disimpulkan bahwa ukuran ketepatan waktu pelaksanaan pendampingan yang dijalankan oleh pihak pendamping PKH telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, permasalahan waktu dalam rentang penyaluran selalu berjalan bersesuaian dengan waktu turunnya anggaran dana yang akan disalurkan terhadap masyarakat penerima manfaat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari segi waktu peran pendamping dalam melakukan pengawasan penyaluran bantuan sudah berjalan dengan baik, sehingga disimpulkan bahwa peran pendamping sangat efektif dalam mengawasi penyaluran bantuan.

### **c. Perubahan Nyata**

Kriteria ini mengukur apa yang telah dikerjakan dan dihasilkan. Maksudnya adalah sejauh mana pendamping PKH melaksanakan tugasnya dan apa saja yang

telah dicapainya. Pelaksanaan pendampingan tidak lepas dari tugas pokok pendamping PKH yang telah diatur oleh Kementerian Sosial.

Dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya, pendamping PKH mengacu pada ketentuan yang telah diatur oleh Kementerian Sosial. Ketentuan tersebut menjadi acuan pendamping dalam menjalankan perannya. Pendamping juga tidak lepas dari harapannya yang menginginkan terjadinya suatu perubahan terhadap masyarakat atau kelompok dampungannya.(Rahayu, 2012)

Efektivitas dari perubahan nyata yang dihasilkan adalah ketepatan harapan, implementasi, dan harapan yang dicapai. Sesuatu dianggap efektif apabila proses pelaksanaan selalu menampakkan ketepatan antara harapan yang diinginkan dengan hasil yang dicapai. Derajat pencapaian menunjukkan derajat efektivitas. Artinya, efektivitas merupakan suatu usaha atau tindakan yang dilakukan dengan sebaik-baiknya agar dapat mencapai apa yang diharapkannya, sehingga dapat memberikan suatu hasil perubahan.(Handoko, 2012)

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas, maka disimpulkan bahwa efektifitas kinerja yang di ukur berdasarkan perubahan nyata dari dampak kinerja pendamping PKH menunjukkan respon positif dari masyarakat dalam ini keterangan yang diambil dari informan yang digunakan dalam penelitian ini. Masyarakat menganggap bahwa dampak dari pengawasan yang dijalankan pendamping PKH memberikan perubahan nya, yaitu terkait adanya kemudahan-kemudahan yang diterima masyarakat dari peran pendampingan PKH, dan juga

mampu memberikan dampak perubahan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial, dibidang kesehatan dan pendidikan masyarakat penerima manfaat PKH.

Maka dapat disimpulkan bahwa sejauh ini perang pendampingan yang dilaksanakan pendamping PKH dalam melakukan pengawasan penyaluran bantuan sosial memberikan dampak positif terhadap perubahan nyata yang diterima masyarakat, dalam hal ini terlihat dari adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dari segi kesehatan, pendidikan dan juga pemenuhan kebutuhan keluarga. Sehingga dinyatakan bahwa peran pengawasan pendamping PKH efektif dalam penyaluran bantuan sosial penerima manfaat PKH.

Dalam melaksanakan tugas pendampingan, tentu ingin mencapai hasil yang maksimal. Namun demikian hasil itu tidak selalu sesuai dengan harapan atau targetan yang telah ditentukan. Dinamika tersebut tidak terjadi karena begitu saja, melainkan disebabkan oleh adanya banyak faktor. Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pendamping PKH dalam melakukan pendampingan terbagi menjadi dua, faktor yang berasal dari penerima manfaat dan faktor diluar dari pendamping meliputi : peserta penerima bantuan PKH tidak hadir tepat waktu bahkan ada yang tidak hadir pada acara pendampingan. Masih ada keluarga penerima manfaat PKH yang tidak memeriksa kesehatan pada layanan kesehatan, dana tidak cair atau tidak sesuai dikarenakan pengaruh jaringan saat menginput data sehingga data tidak tersimpan dan tidak update.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu dengan menggunakan teknik data dokumentasi, observasi dan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa : Peran pendamping sosial dalam penyaluran PKH di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu sudah tampak efektif dalam melakukan peranannya sebagai pengawas dan juga telah melakukan berbagai peran teknis secara maksimal. hal ini dapat terlihat pada Ketepatan waktu sudah cukup baik dari waktu pelaksanaan program hingga berakhirnya program sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian tujuan pendamping PKH selama ini telah memenuhi sasaran, terlihat dari keberhasilan pendamping PKH dalam memberdayakan masyarakat miskin, pendamping sosial PKH menjadi perwakilan keluarga tersebut untuk menyampaikan informasi ke Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan kecamatan. Dan juga dapat melakukan verifikasi, pengisian form data keluarga penerima manfaat PKH, serta diharuskan untuk membuat laporan setiap bulan untuk diserahkan ke Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Desa Telaga Suka.

Namun ada beberapa peran yang belum maksimal dilakukan oleh pendamping PKH seperti pencapaian tujuan dan juga keakuratan hasil kerja. Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pendamping PKH dalam melakukan pendampingan terbagi menjadi dua, faktor yang berasal dari penerima manfaat dan faktor diluar dari

pendamping meliputi : peserta penerima bantuan PKH tidak hadir tepat waktu bahkan ada yang tidak hadir pada acara pendampingan. Masih ada keluarga penerima manfaat PKH yang tidak memeriksa kesehatan pada layanan kesehatan, dana tidak cair atau tidak sesuai dikarenakan pengaruh jaringan saat menginput data sehingga data tidak tersimpan dan tidak update.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan pengalaman di lapangan dan informasi yang diperoleh, kiranya peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada pendamping sosial PKH, saran peneliti agar pendamping sosial lebih meningkatkan perannya sebagai pendamping agar program keluarga harapan ini diharapkan dapat berhasil dalam menuntaskan kemiskinan dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin.
2. Kepada penerima manfaat PKH, saran peneliti agar para peserta PKH selalu memenuhi kewajibannya dan terus membangun komunikasi dan kerjasama dengan pendamping PKH agar permasalahan atau kendala yang terjadi dapat diselesaikan dengan mudah.
3. Kepada perangkat kelurahan. Saran peneliti untuk lebih memperhatikan kinerja pendamping PKH agar lebih baik lagi dan bisa lebih memperhatikan masyarakat miskin diwilayahnya agar bantuan sosial tersebut bisa diberikan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, F. (2012). *pengantar kesejahteraan sosial*. Remaja Rosdakarya.
- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu.
- Arikunto, S.P (2019). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Brandan, D. P. (2015). Strategi Pengawasan Langsung Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penataan Pasar Tradisional. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 1(November), 1–14.
- Brantas. (2009). *Dasar-dasar Manajemen*. Alfabeta.
- Dany, G. A. R., & Habibah, S. M. (2021). Efektivitas Blt Bagi Warga Non-Pkh Sebagai Pemenuhan Hak Perlindungan Sosial Selama Covid-19 Di Dusun Sudimoro. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan. Volume 09 Nomor 02 Tahun 2021*, 435-452, 9(2), 435–452. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/view/40648>
- Effendi, S. (2019). *metode penelitian survei*. LP3ES.
- Habibullah, A. (2010). *Kajian pemanfaatan dan pengembangan E-government*. Rajawali Pers.
- Haeruddin, H. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Dinas Sosial Kabupaten Donggala. *Jurnal ADMINISTRATOR*, 3(2), 100–107. <https://doi.org/10.55100/administrator.v3i2.33>
- Halidayati, I. (2014). Pengaruh pengawasan internal, pengawasan eksternal dan implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi*, 1–22.
- Handoko, H. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Parama Ilmu.
- Harbani Pasolong. (2017). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231–246. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446>
- Manullang. (2012). *Dasar-Dasar Manajemen*. Ghalia Indonesia.

- Masyhar, Tindjabate, C, . Alamsyah.N.M. (2021). Implementasi Program Keluarga Dalam Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali. *Juormale-Proceding of Managemnt*, 3(2), 35–46.
- Rahayu, S. Iestari. (2012). *Bantuan sosial Indonesia*. Fokusmed.
- Rohmah, Y. A. (2015). Analisis akuntabilitas program keluarga harapan. *Jurnal Aplikasi Administrasi*, 18(September 2014), 1–9.
- Rohman, A. (2009). *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. LaksBang Mediatama.
- Sagian, S, P. (1982). *Organisasi, Kepemimpinan Dan Perilaku Administrasi*. Gunung Agung.
- Suri, A., & Daulay, M. (2022). Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara di Dinas Sosial Kota Medan. *JIMF (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma)*, 2(April), 57–67.
- Syahrial, S., & Desrina, T. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Di Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(1), 58–74. <https://doi.org/10.47233/jebis.v2i1.63>
- Widanarto, A. (2006). Pengawasan Internal , Pengawasan Eksternal. *FISIP Universitas Padjadjaran*, 12(1), 1–18.
- Wulandari, R. M. D. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Karangduwur. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2), 5228–5234.
- Yusri, M. (2021). Kebijakan dan Perencanaan Sosial di Indonesia. In *Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen*. <http://umsupress.umsu.ac.id/>

Acc Pemb  
Slm 5/2022  
8

**Draft Wawancara**  
**Efektivitas Pengawasan Internal Pendamping Pkh Dalam**  
**Penyaluran Bantuan Sosial Di Desa Telaga Suka**

**A. Identitas Informan**

- a. Nama :
- b. Usia :
- c. Agama :
- d. Jenis Kelamin :
- e. Pekerjaan :

**B. Daftar Pertanyaan**

**Aspek Pengawasan Internal Pendamping PKH**

**B.1 Pemahaman Program**

1. Apakah Ibu sebagai Koordinator Pendamping PKH sudah memahami dengan jelas Program PKH dan tugas – tugas Pedampingan PKH?
2. Apakah Ibu bisa menjelaskan tugas – tugas dari pendampingan PKH?
3. Selaku Koordinator pedamping PKH, Apakah ada kendala yang dihadapi ibu, maupun anggota pendamping dan keluarga penerima manfaat?

**B.2 Ketepatan Waktu**

1. Apakah ada rentang waktu yang telah ditentukan untuk ibu melaksanakan tugas pendampingan?
2. Dalam rentang sebulan, berapa kali selayaknya pendamping melakukan tugas pendampingan?
3. Jika ibu dalam melaksanakan tugas tidak tepat waktu, apakah ada sanksi yang diberikan?

**B.3 Pencapaian Tujuan**



1. Bagaimana dampak pendampingan yang pendamping lakukan terhadap Keluarga Penerima Manfaat dalam memberdayakan masyarakat miskin?
2. Dalam mendampingi KPM, Apakah ada strategi yang ibu lakukan agar masyarakat yang dulunya miskin menjadi lebih sejahtera?
3. Apakah prosedur pendampingan yang dilakukan sudah sesuai dengan pelaksanaan pendampingan di Desa Telaga Suka? Dan Bagaimana Pandangan bapak/ibu terkait masih adanya beberapa masyarakat miskin yang belum menerima bantuan?

### **C. Daftar Pertanyaan**

#### **Aspek Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial**

##### **C.1 Akurat**

1. Apakah menurut bapak/ibu sasaran pendampingan program keluarga harapan sudah tepat?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana tolak ukur tepat sasaran pendampingan yang dilakukan pendamping?
3. Apakah menurut bapak/ibu pendampingan yang dilakukan pendamping PKH dalam Menyalurkan bantuan sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai?

##### **C.2 Tepat Waktu**

1. Apakah bapak/ibu mengetahui ada rentang waktu yang ditentukan dalam melaksanakan tugas pendampingan?
2. Berapa kali dalam sebulan masyarakat Desa Telaga Suka didampingi pendamping PKH?
3. Mengingat jumlah pendamping PKH di desa Telaga Suka hanya terdapat 1 orang, apakah pendamping PKH dapat melaksanakan tugasnya dengan tepat waktu?

##### **C.3 Perubahan Nyata**

1. Apakah bapak/ibu merasakan dampak atau efek yang positif dari pendampingan para pendamping PKH?
2. Apakah pendampingan yang dilakukan pendamping PKH mempermudah urusan masyarakat Telaga Suka dalam mengikuti program PKH?
3. Bagaimana harapan bapak/ibu untuk kedepannya mengenai pendampingan dan program keluarga harapan agar dapat lebih mensejahterakan masyarakat melalui program ini?



### Lampiran





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

Nomor : 1168/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2022  
 Lampiran : --  
 Hal : **Mohon Diberikan izin**  
**Penelitian Mahasiswa**

Medan, 11 Muharram 1444 H  
 09 Agustus 2022 M

Kepada Yth : **Kepala Desa Telaga Suka**  
**Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Lebuhbanatu**  
 di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
 Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **AZIRA WAHYU ARMANDA**  
 N P M : 1803100067  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2021/2022  
 Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL PENDAMPING PKH**  
**DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI DESA TELAGA**  
**SUKA**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan.



**Dr. ARIEN SALEH, S.Sos., MSP.**  
 NIDN: 0050017402



Cc : File.







**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU**  
**KECAMATAN PANAI TENGAH**  
**DESA TELAGA SUKA**  
 JALAN PANGLIMA TIMUR DESA TELAGA SUKA KODE POS .21472

Telaga Suka, 12 September 2022

Nomor : 145/563/1512/TS/2022  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : -  
 Perihal : Balasan Izin Penelitian

Kepada Yth :  
 Bapak Dekan  
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di-  
 Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 1168/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2022 tanggal 09 Agustus 2022 tentang Izin Penelitian kepada Mahasiswa kita, bersama ini kami atas nama Pemerintahan Desa Telaga Suka memberikan Izin Penelitian kepada Mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : AZIRA WAHYU ARMANDA  
 NPM : 1803100067  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2021/2022  
 Judul : EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL PENDAMPING PKH  
 DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI DESA TELAGA SUKA.

Demikian surat balasan penelitian ini diperbuat agar dapat di pergunakan sebagaimana perlunya.

**Pj.KEPALA DESA TELAGA SUKA**

**SOFYAN S.P.**  
 PENATA MUDA  
 NIP.19780114200103 1 001



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

🌐 <https://fisip.umsu.ac.id> ✉ [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) 📱 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN**  
**JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.  
**Bapak/Ibu**  
**Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik**  
**FISIP UMSU**  
 di  
**Medan.**

Medan, 22 - April ..... 2022

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : Azira Wahyu Armanda  
 NPM : 1803100067  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Tabungan sks : 136 sks, IP Kumulatif 3,21

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No.	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Efektifitas pengawasan internal pedamping PKH dalam Penyaluran bantuan sosial di Desa Telaga Suka	Acc 23/4 2022
2	Efektifitas Profesionalisme Pimpinan dalam mengelola damkar di kecamatan Parai tengah.	
3	Dampak Program keluarga harapan (PKH) di desa Telaga Suka.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih *Wassalam.*

Pemohon

Rekomendasi Ketua Program Studi :  
 Diteruskan kepada Dekan untuk  
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 22 - April ..... 2022

Ketua,

(Ananda Maharika, S.sos, M.sp)  
 NIDN: 0122118801

PB: SyafRUDDIN (Azira Wahyu Armanda)

054

Dosen Pembimbing yang ditunjuk  
 Program Studi.....

(SyafRUDDIN, S.Sos, M.H)  
 NIDN: 0130056601



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [fumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING**  
**Nomor : 807/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2022**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **22 April 2022**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **AZIRA WAHYU ARMANDA**  
N P M : 1803100067  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2021/2022  
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL PENDAMPING PKH  
DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI DESA TELAGA  
SUKA**  
Pembimbing : **SYAFRUDDIN., S.Sos., M.H.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 054.18.310 tahun 2022.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 22 April 2023.**

Ditetapkan di Medan,  
Pada Tanggal, 08 Dzulqaidah 1443 H  
08 Juni 2022 M



**Dr. Azidin Saleh., S.Sos., MSP.**  
NIDN. 0010017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.







Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kepten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-3

PERMOHONAN  
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 22 JUNI 2022

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : AZIRA WAHYU ARMANDA  
 N P M : 1803100067  
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti **Seminar Proposal Skripsi** yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 807.../SK/II.3/UMSU-03/F/20.22.. tanggal 08 Juni 2022 m

08 Juni 2022 m  
 EFektivitas Pengawasan Internal Pendamping PKH Dalam  
 ... PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI DESA TELAGA SUKA

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir **ASLI**;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposals Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna **BIRU**.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(.....)

Pemohon,

(AZIRA WAHYU ARMANDA)





**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 1095/JUND/II.3.AU/UMSU-03/F/2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Jum'at, 22 Juli 2022  
Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB  
Tempat : Online/Daring  
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOHOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
6	AZIRA WAHYU ARMANDA	1803100067	RAFEOAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL PENDAMPING PKH DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI DESA TELAGA SUKA
7	ANDRE FARSYA ANDORIA	1803100014	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	PENGARUH ROTASI PEGAWAI TERHADAP PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KERJA DI PT. PEGADAAN CABANG MEDAN UTAMA KANWIL I MEDAN
8	ABDUL RAUF ALBATASJ	1803100059	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	RAFEOAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DI KECAMATAN BABALAN
9	MUHAMMAD ALWI HILMI	1803100031	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI KEBUAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PEKAN DOLOK MASHUL KECAMATAN DOLOK MASHUL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
10					

Medan, 21 Dzulhijjah 1443 H  
20 Juli 2022 M





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : Azira Walmu Amanda  
 N P M : 1803100067  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
 Judul Skripsi : Efektivitas Pengawasan Internal Pedamping PKH Dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Desa Telaga Suka

No.	Tanggal	Kegiatan Adv. Bimbingan	Panah Pembimbing
1.	20.7.22	- Perbaiki masalah yang ada pada kata-kata belakang	✓
2.	26.7.22	- Buat sistematika penulisan - Perbaiki kata-kata yang salah dan uraian huruf - Perbaiki kutipan harus buat asas pada Bab II	✓
3.	6.8.22	- Lengkapi data nama sumber - Buat sistematika letak Penulisan dan gbr struktur organisasi	✓
4.	19.8.22	- A.C. Bab I, II dan III	✓
5.	22.9.22	- Perbaiki bab sistematika nama sumber pada bab. IV - tambahkan hasil wawancara yg ditambahkan - tambahkan.	✓
6.	23.9.22	- simpulan diambil dari hasil penelitian dan pembahasannya - saran itu masukan dari anda selaku Pembimbing	✓
7.	24.9.22	lengkapi kelengkapan skripsi (CV, SK, - 5 surat balasan dll)	✓
8.	28.9.22	A.C. Pemb. skripsi siap all diuji dalam sidang ptya ujian	✓

Medan, ...28.09.....2022

Dekan,

Ketua Jurusan,

Pembimbing,

Dr. ARIFIN (SALEH, S.Sos., MSP...)

Azira Walmu Amanda, M.S.Sos., M.SP

Syahrudin, S.Sos., M.H



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 1469/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2022

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Hari, Tanggal : Jum'at, 07 Oktober 2022  
 Waktu : 08:00 WIB s.d. Selesai  
 Tempat : Ruang Sidang FISIP UMSU Lt. 2



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJUI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
6	AZIRA WAHYU ARMANDA	1803100067	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH	EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL PENDAMPING PKH DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI DESA TELAGA SUKA
7	ALFI KURNIAWAN	1803100092	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 67 TAHUN 2018 DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERIBAN BERLALU LINTAS DI KAWASAN KOTA KISARAN
8	DINDA PUTRI SOLEHA	1803100042	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA MEDAN
9	AICHA TAMARA DAMANIK	1803100035	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KOTA MEDAN
10	IRA DWI HASTUTI	1803100024	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KARTU ASURANSI NELAYAN DI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN

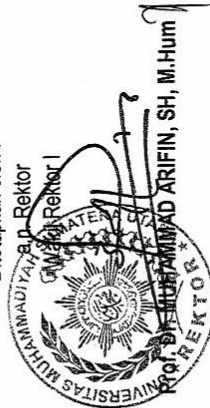
Notulis Sidang :

1.

Medan, 09 Rabiul Awwal 1444 H  
 05 Oktober 2022 M

Ditetapkan oleh :

Rektor



Sekretaris



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



# Jurnal KESKAP

*Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik*

## SURAT KETERANGAN

No. 197/KET/KESKAP/IX/2022

Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Azira Wahyu Armanda, Syafruddin  
 Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik:

Judul : Efektivitas Pengawasan Internal Pendamping PKH  
 Dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Desa Telaga Suka  
 Jumlah Halaman : 11 Halaman  
 Penulis : Azira Wahyu Armanda, Syafruddin

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 29 September 2022

Redaktur Jurnal KESKAP



Sigit Hardiyanto, S.Sos, M.I.Kom

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Azira Wahyu Armanda  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tanggal Lahir : Labuhan Bilik, 08 Maret 2000  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Lengkap : Jl. Telaga Suka, Labuhan Bilik  
Telepon : 083196670827  
Email : aziharahapp@gmail.com

**Data Orang Tua Nama**

Ayah : Zulkifli  
Ibu : Leni Gusnimar

**Data Pendidikan**

Tahun 2007-2012 : SD Negeri 08 Panai Tengah  
Tahun 2012-2015 : MTS Negeri Panai Tengah  
Tahun 2015-2018 : MAN 2 Model Medan